



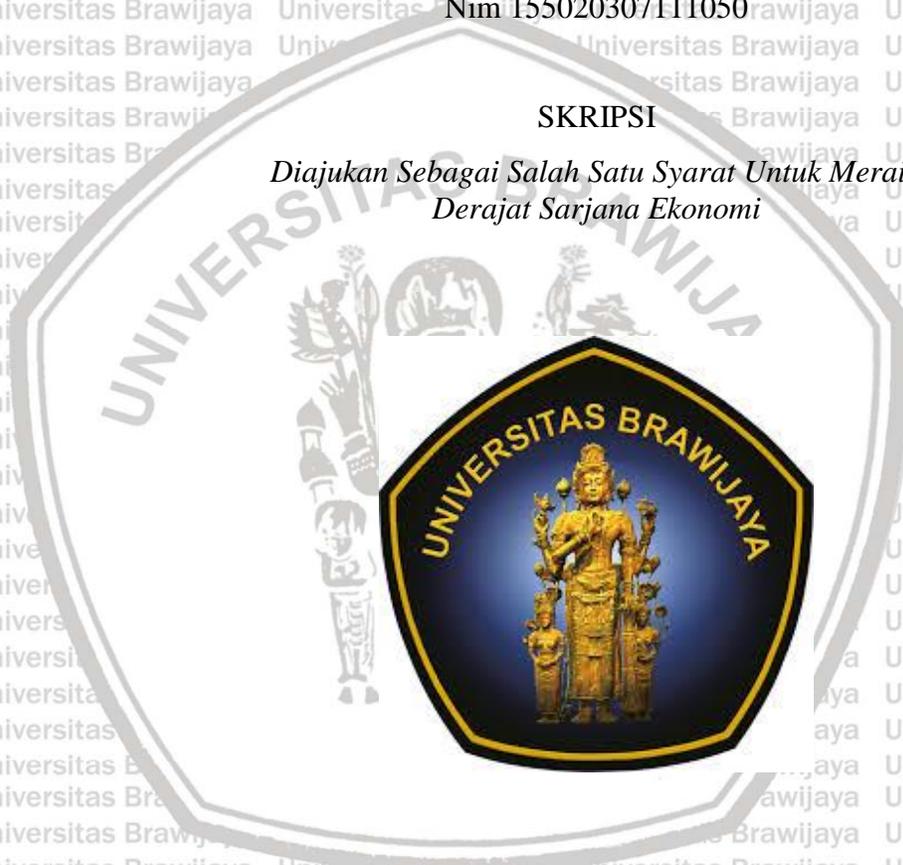
**PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

(STUDI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

Disusun Oleh:
Gressye Junita Malutu
Nim 155020307111050

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul :

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

Yang Disusun Oleh:

Nama : Gressye Junita Malutu

Nim : 155020307111050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Malang, 13 Oktober 2020

Dosen Pembimbing,

Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak

NIP. 19780415 200502 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(STUDI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

Yang disusun oleh:

Nama : Gressye Junita Malutu

NIM : 155020307111050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Sektor Publik

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 23 November dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE.,M.Ak.,Ak

NIP. 19780415 200502 1 001

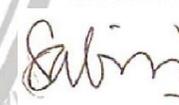
(Dosen Pembimbing)



2. Dr. MT. Sabirin, SE., Ak., MBA.

NIP. 19650918 199002 1 001

(Dosen Penguji I)



3. Helmy Adam, SE., MSA., Ak.

NIP. 19790403 200501 1 002

(Dosen Penguji II)



Malang, 23 November 2020

Ketua Program Studi S1 Akunta



Dr. Dra. Endang Mardiaty, M.Si., Ak.

NIP 19590902 198601 2 001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gressye Junita Malutu
NIM : 155020307111050
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul

“Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Talaud)” adalah merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusannya dan gelar kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan apabila diperlukan.

Malang, 13 Oktober 2020



Pembuat pernyataan

Gressye Junita Malutu

NIM. 155020307111050



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.2 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.3 Variasi Akuntansi Sektor Publik.....	12
2.1.4 Basis Akuntansi Sektor Publik.....	13
2.2. Tingkat Pendidikan.....	15
2.2.1 Pengertian pendidikan.....	15
2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan.....	18
2.2.3 Indikator Pendidikan.....	20
2.3 Kemiskinan.....	22
2.3.1 Pengertian Kemiskinan.....	22
2.3.2 Indikator Kemiskinan.....	23
2.3.3 Kriteria Kemiskinan.....	23
2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah.....	26
2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan.....	26
2.4.2 Pengukuran Kinerja.....	27

2.4.3 Indikator Kinerja.....	28
2.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	30
2.4.5 Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD.....	31
2.4.6 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	37
2.5 <i>Public Expenditure Tracking Survey</i> atau survey penelusuran belanja publik (PETS).....	38
BAB III.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lingkup Penelitian.....	40
3.3 Jenis Data dan Sumber Data.....	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Metode Analisis Data.....	43
BAB IV.....	46
4.1. Gambaran Umum.....	46
4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud.....	48
4.2. Kinerja Keuangan.....	48
4.2.1. Analisi Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal).....	49
4.2.2. Analisis Tingkat Efektivitas PAD.....	52
4.2.3. Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah.....	54
4.2.4 Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Daerah.....	56
4.2.5 Analisis Rasio Pertumbuhan.....	58
4.2.7. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah.....	58
4.3 Analisis Belanja Sektor Pendidikan.....	62
4.3.1. Taraf Pendidikan.....	63
4.4. Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud.....	71
4.5. Pencapaian Kinerja Pemerintah dalam Kemiskinan.....	73
BAB V.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tentang Pola Hubungan dan Tingkat Kemadirian 33

Tabel 2.2 Tentang Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan..... 34

Tabel 2.3 Tentang Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan 35

Tabel 4.1 Tentang Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud 47

Tabel 4.2 Tentang Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 50

Tabel 4.3 Tentang Perhitungan Rasio Efektivitas PAD 52

Tabel 4.4 Tentang Rasio Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Daerah .. 54

Tabel 4.5 Tentang Rasio Keserasian Belanja Daerah 57

Tabel 4.6 Tentang Rasio Pertumbuhan Belanja tidak Langsung 59

Tabel 4.7 Tentang Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung 59

Tabel 4.8 Tentang Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja manfaat Pendidikan 67

Tabel 4.9 Tentang Distribusi Sasaran jumlah Program, Indikator Kinerja dan Kegiatan 75

Tabel 4.10 Tentang Pengkategorian Capaian Indikator Kinerja 76

Tabel 4.11 Tentang sasaran 1 Peningkatan Kualitas Administrasi Kantor 77

Tabel 4.12 Tentang Sasaran 2 Peningkatan Kesejahteraan Sosial 78

Tabel 4.13 Tentang Sasaran 3 Peningkatan Perlindungan Sosial 78

Tabel 4.14 Tentang Sasaran 4 Peningkatan SDM Kesejahteraan Masyarakat..... 79

Tabel 4.15 Tentang Capaian Akuntabilitas Keuangan 80

Tabel 4.16 Tentang Hubungan Kinerja Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Mskn 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tentang Angka Partisipasi Sekolah 64

Gambar 4.2 Tentang Angka Partisipasi Murni Dan Angka Partisipasi Kasar 65

Grafik 4.1 Tentang Program Kegiatan Pemerintah Dalam Pendidikan 69

Gambar 4.3 Tentang Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin 72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016 92

Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2017 98

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018 102

Lampiran 4 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2016 106

Lampiran 5 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2017 109

Lampiran 6 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2018 112

Lampiran 7 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2016 115

Lampiran 8 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2017 118

Lampiran 9 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2018 120

Lampiran 10 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2016 122

Lampiran 11 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017 124

Lampiran 12 Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018 126

Lampiran 13 Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2016 128

Lampiran 14 Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2017 129

Lampiran 15 Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2018 130



ABSTRAK
PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN
DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

(STUDI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)

Oleh :

Gressye Junita Malutu

yunita.malutu8697@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dr. Mohamad Khoiru Rusydi, SE.,M.Ak.,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud di bidang pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.

Metode dan alat ukur yang digunakan adalah jenis pendekatan deskriptif kualitatif.

Alat untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD.

Analisis rasio keuangan tersebut untuk efektivitas merealisasikan pendapatan daerah, kemandirian pemerintah daerah, efisiensi keuangan daerah dalam mengalokasikan pengeluaran yang dibelanjakan, keserasian pemerintah daerah untuk memprioritaskan

alokasi belanja daerah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Data yang di analisis berupa Laporan Realisasi APBD

Tahun 2016-2018. Pendidikan dan Penanggulangan Kemiskina Pada kabupaten

Kepulauan Talaud dengan menggunakan data dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja

pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum optimal dalam mengalokasikan dana keuangan. Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada

jenjang Sekolah Dasar (SD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada jenjang SMA mengalami penurunan, dan di kemiskinan Kabupaten Kepulauan

Talaud selama tahun 2016-2018 terus mengalami penurunan.

Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Pendidikan, Kemiskinan

ABSTRACT**THE ASSESSMENT OF THE LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN
EDUCATION AND POVERTY MANAGEMENT
(A STUDY ON TALAUD ISLANDS REGENCY)****By:****Gressye Junita Malutu****yunita.malutu8697@gmail.com****Advisor: Dr. Mohamad Khoir Rusydi, SE.,M.Ak.,Ak**

The objective of this study is to assess the performance of local government in education and poverty management in Talaud Islands Regency. This research applies qualitative descriptive approach where the financial ratio analysis on Local Government Budget (APBD) is used to measure the financial performance of local governments in managing regional budget. The financial ratio analysis aims for the effectiveness of regional revenue realization, the independence of regional governments, the efficiency of regional budgeting, and setting reasonable budget allocation. The data to analyze is the Local Government Budget realization report in education and poverty management between 2016 and 2018, acquired from Education Authorities, Social Service and Statistics Central Agency. The results indicate that the local government of Talaud Island regency has not optimally allocated the budget. It reveals that, despite the major improvement in primary education, there is a constant deterioration in secondary education and poverty in the regency between 2016 and 2018.

Keywords: Local Government Performance, Education, Poverty



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Kabupaten perbatasan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud beribukotakan di kecamatan Melongguane. Daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km dan luas wilayah daratan 1.251,02 km. Berpotensi dari segi kelautan dan perikanan dari pada Kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Utara. Gambaran awal mengenai APBD Kabupaten Kepulauan Talaud, dimana pendapatan asli daerah masih belum optimal dikarenakan Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki tempat wisata yang dapat menghasilkan pendapatan namun pemerintah masih belum bisa mengalokasikannya dengan maksimal, dimana kontribusi pendapatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terbesar berasal dari dana perimbangan. (BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2018)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014-2019, pada Tahun 2009 proporsi Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dengan persentase 52,49%, namun Tahun 2010 sampai Tahun 2012 proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai 57,07% atau lebih besar dari Belanja Langsung. Hal ini disebabkan dalam Belanja Tidak Langsung ada peningkatan yang signifikan terutama meningkatnya jumlah PNS, kenaikan gaji dan tunjangan aparatur, kenaikan anggaran

desa. Dapat digambarkan secara signifikan pencapaian kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menerepkan otonomi daerah hanya memperlihatkan perbandingan bukan penilaian.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asa otonomi. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri dan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, wajar bila otonomi daerah memiliki arti sebagaimana mendekati kebijakan dengan aspirasi masyarakat di tingkat daerah. Dengan kata lain, aspirasi masyarakat akan mudah ditangkap dan dikonversikan oleh pembuat kebijakan menjadi sebuah kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Terdapat pula wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk secara aktif dan langsung mengupayakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran daerah serta peranan pembangunan daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang semakin penting. Dengan adanya pembangunan

daerah bertujuan untuk dapat meningkatkan partisipasi dari penduduk dalam segala proses kegiatan pembangunan. Agar dapat mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan kualitas penduduk sebagai sumber daya, baik dalam aspek fisik (kesehatan), aspek intelektual (pendidikan), dan aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli).

Mega (2011), dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan. APBD merupakan instrument kebijakan bagi pemerintah daerah yang baik untuk penilaian secara internal maupun yang berkaitan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan.

Mardiasmo (2002:169), penelitian ini menggunakan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas yang telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan.

Halim (2007), menyatakan bahwa ada beberapa rasio yang dapat digunakan dalam penelitian untuk menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari APBD

antara lain: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Rasio Kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan daerah. Rasio Keserasian untuk mengetahui bagaimana pengalokasikan dana belanja daerah pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Rasio Pertumbuhan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja sebelumnya.

Namun dari hasil observasi dilapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum optimal di karena kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pengalokasian dana pendapatan dan belanja daerah pada pelayanan publik/pelayanan untuk masyarakat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, dapat dilihat anggaran belanja pendidikan dimana program wajib belajar 9 tahun yang seharusnya membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya pendidikan tidak sepenuhnya dialokasi dan direalisasikan dengan baik, akibatnya masyarakat lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya dan memfokuskan untuk bekerja demi mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga menurunkan Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni pada jenjang tertentu, sedangkan untuk Program Rumah Tak Layak Huni (RTLH), anggaran yang terealisasikan sudah memenuhi target, namun dari hasil observasi dilapangan ternyata hanya beberapa kepala keluarga saja yang dipilih untuk menerima bantuan

anggaran. Secara umum pemerintah tidak memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat.

Selain dengan Rasio Keuangan penulis juga tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan memfokuskan penelitian pada dinas pendidikan, dengan menggunakan metode *Public Expenditure Tracking Survey* atau Survei Penelusuran Belanja Publik (PETS) merupakan salah satu dari sekian banyak alat akuntabilitas publik yang pernah dipraktikkan di banyak negara.

Odah (2014) *Public Expenditure Tracking Survey* adalah alat/metodologi yang digunakan untuk melacak aliran sumber daya publik (termasuk SDM, keuangan, atau benda/*in-kind*) dari struktur pemerintah paling atas hingga ke tingkat penyedia layanan (misalkan puskesmas). Keunggulan dari metode ini yaitu mampu memetakan aliran sumber daya atau keuangan dari tingkat tertinggi hingga terendah.

Belva (2019), Pendidikan di Indonesia ada 50 juta pelajar artinya Indonesia adalah negara dengan sistem pendidikan terbesar ke 4 di negara dunia. Namun sistem pendidikan Indonesia merupakan salah satu yang paling tertinggal di dunia. Ranking tahun 2012 menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia diukur dari tiga score mata pelajaran *science*, *mathematics*, dan *reading* menempati urutan kedua terbawah di dunia dan banyak yang menganggap bahwa pendidikan hal tertinggal hanya pada daerah tertentu saja. Tapi penelitian dari *Harvard University*, untuk setara dengan negara – negara maju (OECD) anak – anak di Jakarta masih membutuhkan 128

tahun untuk mengejar ketertinggalan. Sedangkan Menurut Prof. H. Madmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-cita yang paling tinggi, agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negara.

Kualitas suatu bangsa dalam mengurangi kemiskinan tersebut ditandai dan diukur dari kemajuan pendidikannya. Dengan ini diharapkan dapat mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan dapat memberikan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam memperbaiki kinerja keuangan untuk mengatasi kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud pada persentase penduduk miskin di Tahun 2018 adalah sebesar 9,50% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017. Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 265.839,00 yang merupakan batas minimum pendapatan untuk di kategorikan sebagai penduduk tidak miskin. Ini menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud menurun sekitar 1,05% dari Tahun 2017. Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud menurun tetapi masih belum berhasil mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu tingkat kemiskinan 8% - 10%. Maka diperlukan pengukuran kinerja suatu organisasi

termasuk di sektor publik untuk peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, untuk menganalisis lebih lanjut terkait Kabupaten Kepulauan Talaud, peneliti melakukan pembahasan lebih mengenai **“PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI PADA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengalokasikan dan merealisasikan anggaran dana daerah ?
2. Bagaimana kinerja dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam meningkatkan kemajuan pendidikan ?
3. Bagaimana kinerja dan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengatasi kemiskinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengalokasikan dan merealisasikan anggaran dana daerah.
2. Untuk mengetahui upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam meningkatkan kemajuan pendidikan
3. Untuk mengetahui upaya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengatasi kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh yaitu:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai Teori Akuntansi Sektor Publik serta dapat mengaplikasikan Teori Akuntansi Publik yang didapati dalam bangku kuliah ke lingkungan yang sebenarnya dilapangan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan mampu memberikan pandangan terkait dengan proses kinerja pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran yang di berikan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kinerja keuangan daerah dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk memahami kondisi keuangan daerah, agar supaya dapat merumuskan strategi kebijakan yang sesuai dan tepat untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Halim (2014:251), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola oleh pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sedangkan Bastian (2007), menyatakan bahwa sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang tindih batasan.

Halim (2014), mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik sebagai suatu kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dan entitas pemerintah guna pengambilan keputusan dan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut Bastian (2007), Akuntansi Sektor Publik adalah akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan Analisis Akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat. Definisi tersebut dapat diartikan bahwa dana masyarakat adalah dana yang dimiliki oleh

masyarakat bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi-organisasi sektor publik dan juga pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Pengertian diatas dapat disimpulkan Akuntansi Sektor Publik adalah Akuntansi terkait informasi keuangan untuk mengelola urusan-urusan yang berkaitan dengan publik, dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak politik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan alternatif penggunaan.

2.1.2 Prinsip Sistem Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2007), persyaratan Akuntansi Sektor Publik telah ditentukan dalam *A manual for Government Accounting* dan *United National Organization (PBB)* sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi membantu proses pemeriksaan dan penyajian informasi yang akan diperiksa.
2. Sistem Akuntansi seharusnya selaras dengan pengawasan administratif terhadap dana, kegiatan, manajemen program, pemeriksaan internal dan penilaian kinerja.
3. Sistem Akuntansi dirancang untuk memenuhi persyaratan Perundang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya.
4. Sistem Akuntansi seharusnya selaras dengan klasifikasi anggaran sehingga fungsi penganggaran dan Akuntansi saling melengkapi dan terintegrasi.
5. Rekening dikaitkan dengan jelas pada objek, tujuan penerimaan, tujuan pengeluaran, dan pejabat penanggung jawaban jika terjadi penyimpangan.

2.1.3 Variasi Akuntansi Sektor Publik

1. Akuntansi Dana

Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti, dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang kadang merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana

2. Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya dengan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban.

3. Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ini berarti transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih awal, yaitu pada pesanan dibuat dan diterima.

2.1.4 Basis Akuntansi Sektor Publik

Basis Akuntansi Sektor Publik adalah himpunan dari standar Akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan pencatatan Akuntansi yaitu, :

1. Basis Kas

Basis Kas mengakui dan mencatat transaksi keuangan yang berfokus pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukuran ini pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan.

Lingkup Akuntansi berbasis ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, beberapa karakteristik basis kas adalah :

- a. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja dan pada peraturan lainnya.
- b. Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambil keputusan.
- c. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima atau dibayarkan.
- d. Mengukur aliran sumber kas.

2. Basis Modifikasi Kas

Modifikasi kas mirip dengan dasar kas dalam mengakui dan mencatat transaksi di saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya adalah pada basis modifikasi kas, pembukuan masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Adapun karakteristik dari basis modifikasi kas adalah :

- a. Arus kas pada awal periode pelaporan yang telah di pertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas pada periode saat ini.

b. Pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku.

c. Penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut berasal dari transaksi sebelumnya diakui sebagai pendapat dan pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya.

3. Basis Akrua

Basis akrual mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dasar akrual adalah aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

4. Basis Modifikasi Akrua

Basis modifikasi akrual mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut. Pada basis modifikasi akrual, aktiva berwujud dibebankan pada saat pembelian elemen yang diakui adalah aktiva, keuangan, kewajiban utang atau aktiva keuangan netto, pendapatan, dan pengeluaran modifikasi akrual. Kelemahannya adalah tidak dapat memberikan pelayanan jasa publik. Beberapa karakteristik dari basis modifikasi akrual yaitu :

a. Asset fisik dibiayakan pada saat pembelian.

b. Seluruh asset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akrual.

c. Transaksi diakui pada saat transaksi terjadi.

2.2. Tingkat Pendidikan

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Bagi negara maju, pendidikan digunakan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas hidup para warga negaranya.

Sedangkan bagi negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan mereka di kancah internasional sehingga mereka dapat disejajarkan dengan negara-negara maju.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menjelaskan Pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pada pasal 1 ayat (2) Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Martiarini (2016), kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan dari keberhasilan peserta didik memahami pelajaran, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga perilaku tidak mengarah pada penyimpangan yang bersifat amoral. Kualitas hasil belajar peserta didik terkait erat dengan kemampuan pengajar dalam menyampaikan pesan-pesan moral dalam setiap proses pembelajaran, mengingat kemajuan jaman juga diikuti pula dengan meningkatnya perilaku kriminal.

Menurut Wardani (2011), dalam sebuah ulasan kritisnya tentang meningkatnya perilaku criminal dan amoral, menyatakan bahwa ada sebuah konsep timur yang sudah lama lahir dan lebih tepat untuk diterapkan oleh pengajar dalam proses pengajaran di Indonesia untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, yaitu sistem among yang terdiri dari : ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sistem Among adalah cara untuk mendidik yang dipakai oleh konsep perguruan Tamansiswa. Among atau ngemong bermakna memberi kebebasan kepada anak didik untuk bergerak menurut kemauannya, tetapi pamong/guru akan bertindak jika ternyata ada perilaku atau sikap anak didik yang dirasa akan membahayakan keselamatannya

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Formal terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi. Tiga tingkat Pendidikan antara lain sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar merupakan jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan

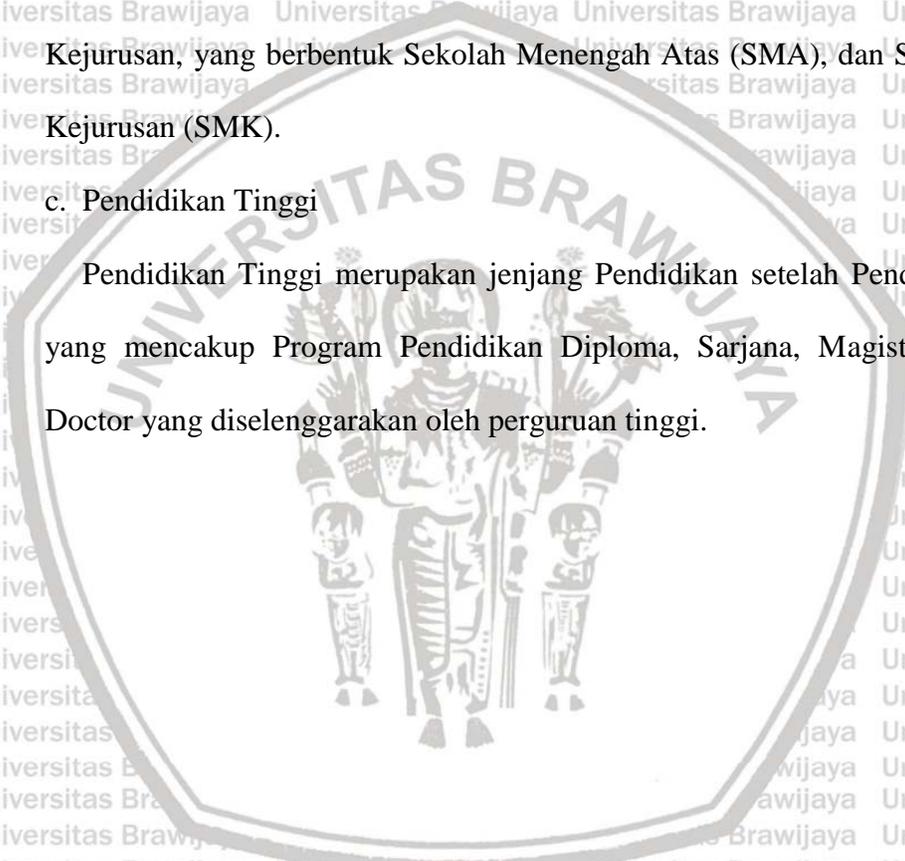
Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lainnya yang sederajat.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah merupakan lanjutan dari Pendidikan Dasar. Pendidikan Menengah terdiri dari Pendidikan Menengah Umum dan pendidikan Menengah Kejuruan, yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan jenjang Pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis, dan Doctor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.



2.2.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS adalah bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Cakap, Kreatif, Mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Trumbull dan Fisch (2011), merangkum beberapa penelitian yang dilakukan oleh Reese dkk pada tahun 1995, Li pada tahun 2002, dan Trumbull dkk pada tahun 2002 mengenai perbedaan cultural di tiga kelompok siswa imigran Amerika Latin, China, dan Amerika-Eropa di Amerika. Hasilnya adalah, peserta didik imigran Amerika Latin dan China menunjukkan persamaan, bahwa selain menjadi anak yang pandai mereka berharap dapat menjadi “anak yang baik” di sekolah, yaitu anak yang paham tentang konsep moral. Sebaliknya untuk para peserta didik dari kelompok Amerika-Eropa lebih berorientasi menjadi “anak yang pandai”, mereka tidak terlalu peduli dengan persoalan moral. Perbedaan orientasi ini menurut Trumbull dan Fisch (2011) disebabkan oleh latar belakang keluarga, siswa imigran Amerika-Latin dan China berasal dari keluarga dengan pola interaksi kolektif sedangkan siswa Amerika-Eropa berasal dari keluarga dengan pola interaksi yang lebih individual. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tampak bahwa ada persamaan antara pola interaksi pada siswa dengan latar belakang keluarga imigran Amerika Latin-China dan Indonesia.

Dari paparan tersebut diatas tampak bahwa perlu adanya upaya mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Karakter ke dalam kehidupan siswa di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik di dalam mata pelajaran maupun diluar mata pelajaran. Sudah saatnya penilaian prestasi siswa tidak hanya didasarkan pada seberapa tinggi nilai pelajaran Matematika atau Bahasa saja, tetapi juga penilaian terkait komponen sikap dan perilaku yang menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan memiliki karakter yang kuat. Penelitian yang dilakukan oleh Benninga, Berkowitz, Kuehn, dan Smith (2003) menunjukkan bahwa pada sejumlah Sekolah Dasar di California, tuntutan sekolah kepada murid bukan sekedar memiliki prestasi akademik yang tinggi saja, melainkan juga memiliki karakter positif yang kuat, hasil riset menunjukkan bahwa peserta didik yang memiliki karakter positif yang kuat cenderung akan berorientasi pada capaian prestasi akademik yang tinggi, tidak peduli berapa besar skor IQ yang dimilikinya. Dengan kata lain, karakter yang positif dan kuat lebih berpengaruh terhadap kesuksesan akademik dari pada potensi kecerdasan semata. Sekolah sebagai institusi formal memegang peran yang sangat penting, mulai dari sekolah yang mengakomodir siswa-siswanya yang berada pada usia dini, sampai dengan di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu perlu mengeksplorasi apakah nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam KBKK (Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Konservasi) juga telah dimunculkan pada pendidikan di level Sekolah Dasar, mengingat upaya mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berakhlak akan lebih mudah terwujud jika penanaman nilai yang hendak dicapai telah diterapkan sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Karakter yang dipahami oleh guru Sekolah Dasar dan bagaimana upaya penumbuh kembangnya

2.2.3 Indikator Pendidikan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program Pendidikan adalah melihat penduduk yang melek huruf, partisipasi sekolah dan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Penduduk yang melek huruf adalah persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bisa membaca atau menulis huruf. Keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan selain angka melek huruf ialah angka partisipasi sekolah. Dimana partisipasi sekolah mencerminkan persentase banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok umur disetiap jenjang Pendidikan, kelompok umur tertentu yang masih bersekolah, sehingga dapat digunakan sebagai monitoring keberhasilan program 9 tahun. Tinggi rendahnya angka partisipasi sekolah sangat bergantung pada banyaknya penduduk yang melanjutkan pendidikan/bersekolah.

Indikator lain yang dapat menilai keberhasilan pembangunan di bidang Pendidikan ialah indikator kualitatif pada negara maju, dimana tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu negara. Dimana negara-negara maju secara umum penduduknya sudah memiliki kesadaran tinggi akan arti penting pendidikan dan penguasaan IPTEK. Hal tersebut dilihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju yang sangat tinggi. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di negara maju di tunjang oleh Sistem Pendidikan yang baik dan anggaran pendidikan yang tinggi dari pemerintah. Tingkat Pendidikan di negara maju sudah sangat tinggi, hampir seluruh penduduk bisa membaca dan menulis. Pemerintah mampu memberikan jaminan Pendidikan Dasar

gratis kepada seluruh lapisan masyarakat. Fasilitas di negara maju juga sudah tersedia lengkap. Sistem Pendidikan yang digunakan lebih menekankan pada kecakapan hidup dan kemandirian peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di negara maju sudah berkembang dengan sangat pesat. Negara maju memiliki ilmuwan dalam berbagai disiplin ilmu. Para ilmuwan ini diberikan fasilitas, seperti laboratorium lengkap dengan standar gaji yang tinggi sehingga bisa melakukan inovasi, hasil-hasil inovasi sangat bermanfaat diberbagai bidang, seperti produksi, militer, ruang angkasa, kedokteran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Seperti pada sistem pendidikan di Jepang, Rahmad Assegaf memaparkan bahwa Taman Kana-Kana (TK) di Jepang menerima murid berusia 3 tahun sampai 5 tahun untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak usia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak yang berusia 4 tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun dan bagi pendaftar usia 5 tahun hanya menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. Ini bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain: (1) Merancang pendidikan yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola hidup yang sehat, aman, dan menyenangkan; (2) Menumbuhkan semangat kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh dengan kegembiraan dan kerjasama, (3) Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan bersosialisasi; (4) Mengarahkan penggunaan bahasa dengan benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesama; (5) Mengarahkan minat untuk berkreasi melalui pembelajaran musik, permainan, dan menggambar.

2.3 Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung. Nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin (Suparlan,2004:315).

Menurut Ritonga (2003:1), memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seorang atau sekelompok, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi, terpenuhinya kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

2.3.2 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistika (2010), penempatan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berdasarkan dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan menurut ukuran *World Bank* menempatkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatannya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut *World Bank* adalah USD \$2 per orang per hari.

2.3.3 Kriteria Kemiskinan

Pemerintah menggunakan acuan dari BPS tentang 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tersebut dari tanah/bamboo/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha.
Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jual dengan nilai Rp500.000, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

2.3.4 Pengaruh Realisasi APBD terhadap Kemiskinan Masyarakat

APBD adalah salah satu kebijakan pemerintah daerah yang didalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah termasuk belanja bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi alokasi dan fungsi distribusi yang salah satu fungsinya yaitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan yang dipenuhi oleh swasta.

Pendanaan terhadap fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan beberapa besar jumlah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas umum yang diperlukan, jadi semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan dan kesehatan maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang ada.

Pendidikan yang baik akan meningkatkan kapasitas serta berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Lanjouw dkk, 2001). Ini tentu saja akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas pembangunan manusia.

Pelaksanaan otonomi daerah, total penerimaan daerah yang didapatkan dari pengelolaan sumber daya dan bantuan dari pemerintah yang berupa dana perimbangan khususnya DAK, diharapkan dapat mendorong peningkatan alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dana belanja modal untuk kesejahteraan khususnya pada bidang pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.

Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan. Sejalan dengan peningkatan pelayanan (yang ditunjukkan dengan

peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.

2.4. Kinerja Keuangan Pemerintah

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Bastian (2001:329), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Inpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, dan organisasi.

Menurut Halim (2007:23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang yang digunakan untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam

rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

2. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah, seperti : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.

2.4.2 Pengukuran Kinerja

Mohamad Mahsun (2006: 25), secara umum istilah kinerja digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Sedangkan pengertian pengukuran kinerja menurut Whittaker dalam Bastian (2001:330), menyatakan bahwa pengukuran kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja juga merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajemen untuk :

1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas
2. Menilai pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran oleh manajemen atas program-programnya.
3. Mengolah program secara efisien
4. Menyediakan data dalam pelaksanaan fungsi pengendalian program
5. Membuat kebijakan anggaran
6. Mengelola dan mengukur hasil program
7. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.
8. Mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dipercayakan kepada manajemen.

2.4.3 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator kinerja. Elemen indikator terdiri dari lima elemen yaitu :

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini

dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

2. Indikator keluaran (*ouput*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non fisik. Indikator keluaran ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi, untuk kegiatan yang bersifat penelitian, indikator kinerja berkaitan dengan keluaran paten dan publikasi ilmiah. Indikator ini, misalnya : jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, ketetapan dalam memproduksi barang atau jasa.

3. Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Dengan indikator outcome ini organisasi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak, Misalnya : tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan, produktivitas para karyawan atau pegawai.

4. Indikator Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan waktu). Indikator manfaat ini, misalnya : tingkat kepuasan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat.

5. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Dalam indikator ini, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Misalnya : peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatam pendapatan masyarakat.

2.4.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Bastian (2007:275), menyebutkan beberapa manfaat pengukuran kinerja baik untuk internal maupun eksternal organisasi sektor publik, yaitu:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akun ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengkuran kinerja yang telah di sepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
9. Menunjukkan peningkatan perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

2.4.5 Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD

Analisis keuangan menurut Halim (2007:231), adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan yang tersedia. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD perlu dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Manurut Halim (2007:232) ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut

Paul Harrey dalam Halim (2001:188) antara lain :

1. Pola hubungan instruksif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, Halim (2007:234), yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dalam Melisa Anastasia (2012:82) tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan, maka kriteria efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat pada Tabel 2,2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas (%)	Kriteria
Diatas 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
Dibawah 60	Tidak Efektif

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima, Halim (2007:234). Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatannya yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Menurut Halim (2007:234), rumusan untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efisiensi (%)	Kriteria
Diatas 100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 - 80	Efisien
Dibawah 60	Sangat Efisien

4. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung daerah dan belanja langsung secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung daerah berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja tidak langsung daerah maupun belanja langsung terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pertumbuhan

Halim (2001:272), mengemukakan rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi tahun } ke_n - \text{Realisasi tahun } ke_{n-1}}{\text{Realisasi tahun } ke_{n-1}} \times 100\%$$

Dalam menganalisis rasio pertumbuhan pendapatan perlu mempertimbangkan kontribusi komponen pendapatan, sehingga dapat diketahui kontribusi utama pendapatan. Komponen dari pendapatan adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah adalah besarnya pertumbuhan PAD. Semakin besar kontribusi PAD menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang baik dan sebaliknya.

Hal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa rasio pertumbuhan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah rasio pertumbuhan belanja daerah. Dengan analisis rasio pertumbuhan belanja daerah dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya yang dilakukan selama periode tertentu. Dalam pertumbuhannya diharapkan belanja langsung mempunyai proporsi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak

langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

2.4.6 Kinerja Pelaksanaan APBD

Dasar hukum pengelolaan keuangan termasuk Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai landasan utama kebijakan umum pemerintah ialah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Kebijakan pemerintah yang bersifat khusus di bidang pendapatan daerah, landasan hukumnya ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan arah kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi Pembangunan Daerah.

2.5 Public Expenditure Tracking Survey atau Survey Penelusuran Belanja Publik (PETS)

Odah (2014) *Public Expenditure Tracking survey (PETS)* merupakan salah satu dari sekian banyak alat akuntabilitas publik yang pernah dipraktikkan di banyak negara. *Public Expenditure Tracking Survey* adalah alat /metodologi yang digunakan untuk melacak aliran sumber daya publik (termasuk SDM, keuangan, atau benda/*in-kind*) dari struktur pemerintah paling atas hingga ke tingkat penyedia layanan (misalkan puskesmas). Keunggulan dari metode ini yaitu mampu memetakan aliran sumberdaya/keuangan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Metode PETS ini sebenarnya sangat bermanfaat sebagai langkah awal menginisiasi akuntabilitas publik, dimana masyarakat akan tahu apakah dalam program-program pemerintah terdapat kebocoran anggaran yang bisa ditindaklanjuti kemudian. Akan tetapi, hal ini menjadi cukup sulit dilakukan karena meskipun di Indonesia telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada pelaksanaannya dokumen-dokumen anggaran yang seharusnya terbuka untuk publik

masih sulit didapatkan atau bahkan masyarakat tidak mengetahui sama sekali program pembangunan yang ada di wilayahnya. Birokrasi yang berbelit-belit, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sulit ditemui, dan sistem arsip yang kurang baik menyebabkan data sulit diperoleh.

Oleh karena itu, hasil refleksi yang bisa dilakukan agar metode ini dapat digunakan dengan baik dan memperoleh hasil maksimal, diperlukan sebuah wacana terlebih dahulu/audiensi dengan dinas-dinas terkait tentang kegiatan yang akan dilakukan dan meminta komitmen dari mereka untuk bekerja sama dalam memberikan data. Jika melihat kembali pada pentingnya akuntabilitas publik, seharusnya pemerintah/OPD mau bekerja sama untuk mendorong transparansi, karena tujuan utama dari transparansi adalah terciptanya pelayanan publik yang memiliki performa sosial yang tinggi.

Dengan dukungan Bank Dunia, metodologi PETS dikembangkan dan diterapkan di sektor pendidikan dasar pada tahun 1996, tujuannya adalah mengukur proporsi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sampai ke sekolah-sekolah dasar, jangkauan kebocoran, serta merekomendasikan cara-cara untuk mengurangi kebocoran tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penulis menggunakan metode ini dengan tujuan menyajikan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang menggejalah di masyarakat, hubungan antar variable, pertentangan dua kondisi atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi, perbedaan antar fakta. Penelitian ini terbatas pada perhitungan dengan target Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada dinas-dinas tertentu seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Selanjutnya dari hasil perhitungan besaran dan persentase tersebut, penulis menggunakan pemikiran logis untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang diteliti dengan memaparkan data yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan pengamatan kepustakaan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk dapat memberikan kesimpulan.

3.2 Lingkup Peneliti

Penelitian ini dibatasi pada pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan evaluasi rasio keuangan, tingkat pendidikan, dan persentase kemiskinan penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud. Penelitian ini menggunakan data *time series*, dimana lebih menekankan pada data penelitian yang berupa data rentetan waktu yaitu data Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode 2016-2018

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok dengan aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah dinas-dinas yang terkait seperti, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dimana dinas tersebut memiliki arsip yang dapat mendukung proses penyelesaian permasalahan penelitian, maka dinas tersebut dijadikan sebagai informasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang diperoleh dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, antara lain sebagai berikut :

- a. Data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018
- b. Data Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018

c. Data jumlah penduduk miskin, data ketenaga kerjaan, dan data pendidikan Tahun 2016-2018 yang bersumber dari Badan Statistika Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data :

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa data sekunder yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Pusat Statistika Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada staf ataupun kepada masyarakat secara langsung. Metode ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dan juga mampu memberikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari peneliti baik penelitian kepustakaan maupun penelitian yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian dideskripsikan, sehingga menghasilkan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Analisis data penelitian ini juga terdiri dari deskripsi rinci tentang kinerja keuangan pemerintah, tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Analisis ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan kinerja keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun tahapan metode analisis dalam penelitian ini, yaitu dengan menetapkan konsep perhitungan Rasio Keuangan dalam pengukuran kinerja keuangan, dengan menghitung Rasio Keuangan dari Realisasi Anggaran yang tertuang dalam APBD dan Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2016-2018 yang dilakukan dengan cara :

A. Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Data yang terkumpul dan sudah dinilai serta diukur, kemudian data dianalisis agar hasil penelitian mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain secara sistematis sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan tersebut dengan cara membandingkan dari tahun ke tahun dengan tujuan untuk memperoleh suatu gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud.

2. Menilai kondisi keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan rasio-rasio yang telah ditentukan sebagai indikator penilaian atas pengukuran kinerja pemerintah.

B. Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penulis mengadaptasikan analisis data yang dikemukakan oleh Mega dalam Meloeng (2004:248), antara lain :

1. Mencatat dan menganalisis catatan lapangan.
2. Mengumpulkan, memilih-milih, mengklasifikasi, dan membuat ikhtisarnya.
3. Berpikir dengan jalan membuat kategori data agar mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan temuan-temuan umum.

Teknik analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang benar-benar tepat dalam menjawab rumusan masalah. Pemilihan data dimaksudkan agar data yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah dihilangkan, sehingga fokus penelitian terjaga.

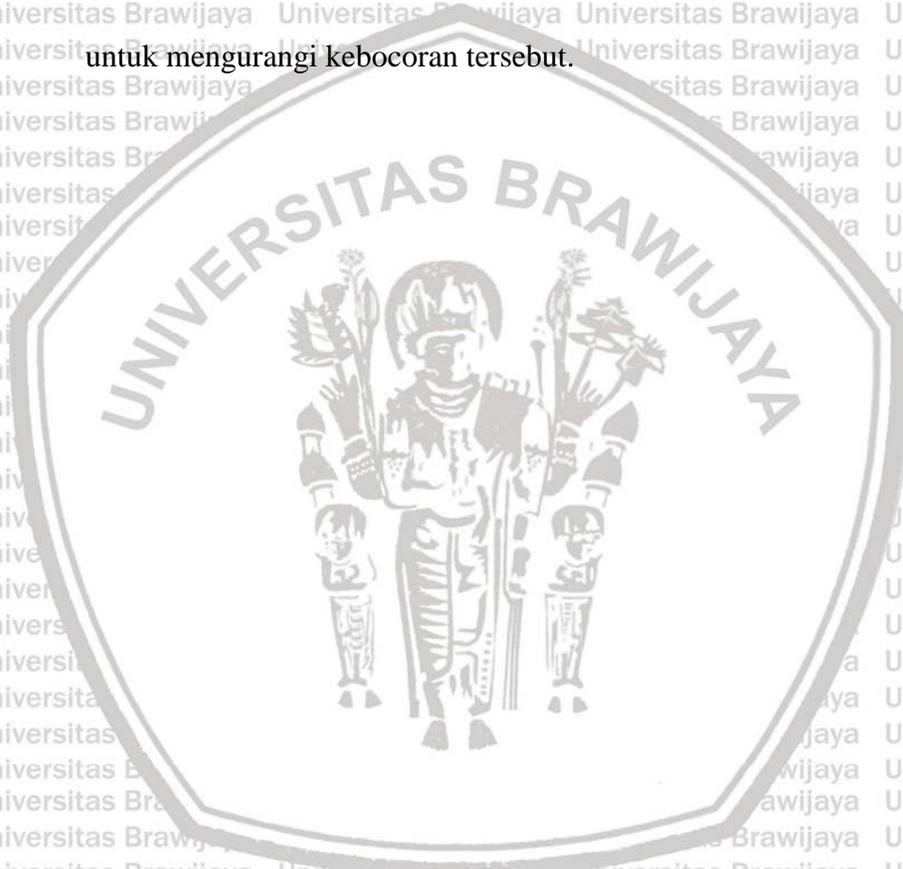
C. Metode *Public Expenditure Tracking Survey* atau Survey Penelusuran Belanja Publik (PETS).

menggunakan metode *Public Expenditure Tracking Survey* atau

Survey Penelusuran Belanja Publik (PETS) merupakan salah satu dari sekian banyak alat akuntabilitas publik yang pernah dipraktikkan di banyak negara.

Public Expenditure Tracking Survey adalah alat/metodologi yang digunakan untuk melacak aliran sumber daya publik (termasuk SDM, keuangan, atau benda/*in-kind*) dari struktur pemerintah paling atas hingga ke tingkat penyedia layanan (misalkan puskesmas). Keunggulan dari metode ini yaitu mampu

memetakan aliran sumberdaya atau keuangan dari tingkat tertinggi hingga terendah. Dengan dukungan Bank Dunia, metodologi PETS dikembangkan dan diterapkan di sektor pendidikan dasar pada tahun 1996. Tujuannya adalah mengukur proporsi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang sampai ke sekolah-sekolah dasar, jangkauan kebocoran, serta merekomendasikan cara-cara untuk mengurangi kebocoran tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan Kabupaten perbatasan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud beribu kotakan di kecamatan Melongguane. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km dan luas wilayah daratan 1.251,02 km yang berpotensi dari segi kelautan dan perikanan dari Kabupaten lain di Sulawesi Utara. Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan pemekaran dari Kabupaten Sangihe (pada saat itu masih Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud), berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2002. Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan. Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki perbatasan yang mana sebelah utara berbatasan dengan Republik Filipina (P Mindanau), sebelah timur berbatasan dengan Laut Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki pertumbuhan yang signifikan pada sektor angkutan kota dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sementara sektor yang lain peningkatannya masih relatif kecil bahkan ada kecenderungan menurun. Perkembangan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh masih belum stabilnya nilai tukar

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pelaku ekonomi lebih cenderung menunggu sampai kondisi stabil dengan tingkat suku Bunga bank yang terjangkau, terutama sekali bagi pengusaha yang mempunyai modal kecil sehingga industri rumah tangga yang banyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami kesulitan untuk meneruskan usahanya. Namun lebih dari itu Kabupaten Kepulauan Talaud juga memiliki kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai.

Sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan potensi untuk dapat menggerakkan pembangunan daerah. Namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumber daya manusia masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016-2018 :

Tabel 4.1
Penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016-2018 (jiwa)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	45.900	43.936	
2017	46.311	44.367	89.836
2018	46.693	44.906	90.678

Data diolah Tahun 2019 : Badan Pusat Statistika

Berdasarkan pada tabel 4.1 Jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud dari Tahun 2016-2018 mengalami pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya. Badan Pusat Statistika telah melakukan proyeksi penduduk berdasarkan hasil sensus

penduduk Tahun 2010 yang menghasilkan informasi bahwa jumlah penduduk

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 sebanyak 90,678 jiwa.

4.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud

Visi :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Rukun Dan Damai,
Bebas Dari Kolusi, Korupsi, Dan Nepotisme”

Misi.:

Dengan Mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Talaud maka Misi Pembangunan
Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan sebagai berikut :

1. Membangun pemerintahan yang bersih dan beribawa yang berorientasi pada layanan masyarakat.
2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang berdayaguna dan berorientasi pada keahlian, profesional, *“The right man of the right place”*
3. Mengembangkan manajemen pendidikan yang berkualitas dengan berorientasi pada pengangkatan sumber daya manusia.
4. Membangun sistem pelayanan kesehatan yang murah, cepat, ramah, dan manusiawi.
5. Membangun percepatan dan peningkatan infrastruktur
6. Meningkatkan peran agama, adat, budaya dalam rangka menciptakan masyarakat Talaud yang rukun dan damai.

4.2. Kinerja Keuangan

4.2.1. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal)

Analisis Kemandirian Daerah (otonomi daerah) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah. Analisis kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang dilakukan terhadap Laporan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Taulaud Tahun Anggaran 2016-2018, bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta kemampuan keuangan tentang Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah. Berikut ini rasio kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2016-2018.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada table 4.2

Tabel 4.2.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Kemandirian %
2016	29.604.217.935,00	798.195.837.433,00	3,70
2017	22.922.644.452,00	858,409.289.856,00	2,67
2018	23,866,863.507,88	825.152.279.447,88	2,89

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020)

Berdasarkan Hasil pada Tabel 4.2. dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 adalah sebesar 3,70%, 2,67%, dan 2,89%. Diketahui bahwa pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016, 2017, dan 2018 berada pada tingkat kemandirian dengan interval 0-25%. Ini berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud telah berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah yang dimiliki dibandingkan pada periode-periode sebelumnya, dapat dilihat dari perhitungan APBD Kabupaten Kepulauan Talaud, total pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan. Sehingga akan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan mampu menjalankan fungsi otonomi daerah dengan baik.

Penelitian ini juga mengindikasikan bahwa PAD berperan penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Menurut Dwirandra (2008), dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan pemerintah kabupaten kepada pemerintah pusat yang pada prinsipnya semakin besar PAD dalam APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan provinsi.

Namun apabila pendapatan daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, maka akan berdampak rugi bagi masyarakat sekitar dan dunia usaha, yang akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan kesejahteraan masyarakat akan melemah karena adanya faktor pemungutan pajak yang tinggi yang dibebankan pada masyarakat. Sehingga pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tidak berdampak pada masyarakat setempat.

4.2.2. Analisis Tingkat Efektivitas PAD

Tingkat efektivitas dari PAD dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target atau anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234). Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100$$

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada table 4.3

Tabel 4.3.

Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efektivitas %
2016	24.542.048.570,00	29.604.217.935,00	120,62
2017	51.506.301.989,00	22.922.644.452,00	44,50
2018	34.686.917.522,00	23.866.863.507,88	68,80

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 120,64 %, 44,50%, dan 68,80% dimana realisasi total PAD Tahun Anggaran 2016 berada diatas Anggaran PAD yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan Tahun 2016 realisasi lain-lain PAD yang jauh berada diatas Anggaran yang ditetapkan dan Tahun Anggaran 2017 sampai berada dibawah Anggaran PAD yang telah ditetapkan. Sesuai

dengan rasio interval pedoman penilaian dan kinerja keuangan maka tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2016 sangat efektif, karena berada pada interval diatas 100% pada Tahun Anggaran 2017 dan 2018 tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kurang efektif, karena pada interval 60-80%.

Namun peningkatan PAD yang diupayakan dari pajak dan retribusi daerah, dengan ini tidak menambah beban bagi masyarakat. Permasalahan utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud adalah pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Dengan harapan secara bertahap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, dengan adanya pola kerjasama dan kemitraan swasta dan masyarakat yang saling menguntungkan. Penetapan target PAD berdasarkan perhitungan potensi rill yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

4.2.3. Analisis Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis tingkat efisiensi keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (Belanja Daerah) dengan realisasi pendapatan yang diterima (Halim, 2007:234). Analisis efisiensi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari suatu kegiatan pelaksana atau proyek dengan melakukan perbandingan antara output/pengeluaran dengan input/masukan. Rasio efisiensi Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Untuk melihat dan membandingkan antara rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel 4.4 .

Tabel 4.4

Rasio Eefisiensi Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016-2018

Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Efisiensi %
2016	834.602.779.563,00	798.195.873.433,00	104,56
2017	870.609.997.204,00	858.409.289.856,00	101,42
2018	812.451.453.376,00	825.152.279.447,88	98,46

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020)

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa rasio efisiensi belanja daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2016 adalah sebesar 104,56%, Tahun 2017 adalah sebesar 101,42%, dan Tahun 2018 adalah sebesar

98,46% atau sesuai dengan tabel 4.4 Tahun 2017 dan 2018 tergolong masih efisien.

Mengingat keterbatasan jumlah anggaran kemampuan keuangan masih belum mampu membiayai secara keseluruhan program/kegiatan yang diharapkan. Solusi yang perlu dilakukan adalah dengan memprioritaskan program dan kegiatan perencanaan dan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka prioritas belanja daerah diarahkan pada program/kegiatan seperti penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan sosial, peningkatan kesempatan kerja, rentalisasi pertanian dan pendesaan, peningkatan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam perspektif ini pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud harus mampu menjawab tuntutan tersebut melalui program dan kegiatan yang tercermin dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Peneliti menyimpulkan, bahwa pemilihan kebijakan pembiayaan daerah yang berorientasi pada pendapatan daerah yang lebih tinggi daripada pendapatan belanja daerah akan menciptakan kebijakan pembiayaan yang surplus. Sebaliknya, belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah menunjukkan kebijakan pembiayaan daerah yang benefit. Namun dalam teori keuangan publik mengekspektasikan hubungan terbalik (tidak searah) antara pembiayaan surplus (positif, pendapatan > belanja), maka kesejahteraan masyarakat menurun. Sebaliknya, pembiayaan defisit (negatif, pendapatan < belanja), maka kesejahteraan masyarakat meningkat.

4.2.4 Analisis Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal (Halim, 2017:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio Keserasian Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Langsung}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Untuk dapat melihat dan membandingkan antara rasio belanja tidak langsung dan belanja langsung daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dapat dilihat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Rasio Keserasian Belanja Daerah Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun Anggaran		
		2018 (Rp)	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Total Belanja Tidak langsung	511.495.160.475,00	433.078.698.467,00	441.504.132.515,00
2	Total Belanja Langsung	300.956.792.901,00	473.531.298.737,00	393.098.647.048,00
3	Total Belanja Daerah	812.451.453.376	906.609.997.204	834.602.779.563
		%	%	%
	Rasio Belanja Tidak Langsung	62,95	47,76	52,90
	Rasio Belanja Langsung	37,04	52,23	47,10

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 52,90%, Tahun Anggaran 2017 47,76%, dan pada Tahun Anggaran 2018 sebesar 62,95%, sehingga rasio total belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2016-2018 sebesar 54,53%. Total belanja langsung terhadap total belanja daerah pada Tahun Anggaran 2016 sebesar 47,10%, Tahun Anggaran 2017 sebesar 52,23%, dan Tahun Anggaran 2018 sebesar 37,04%,. Memperlihatkan rasio alokasi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung. Menurut Titin (2012:6) Belanja Langsung digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam peraturan daerah. Belanja Langsung diharapkan mempunyai proposi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, karena belanja langsung lebih mengarahkan pada program kegiatan yang

telah dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.5 Analisis Rasio Pertumbuhan

Analisis rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Analisis rasio pertumbuhan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan APBD, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluarannya atau belanja daerah.

4.2.7. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Tujuan dari analisis pertumbuhan terhadap belanja daerah ialah melihat perkembangan belanja daerah, belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam perhitungan APBD selama periode yang di analisis. Rasio pertumbuhan ini berguna untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada tahun sebelumnya, baik terhadap belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

a. Pertumbuhan Belanja Tidak langsung dan belanja Langsung

Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018 disajikan pada tabel 4.6 dan Pertumbuhan Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016-2018 disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4.6
Rasio Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2016	441.504.132.515,00	-
2017	443.078.698.647,00	4,43
2018	511.495.160.475,00	15,44

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dat diolah (2020)

Tabel 4.7
Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja Langsung
Tahun 2016-2018

Tahun	Realisasi (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2016	393.098.647.048,00	-
2017	437.531.296.737,00	11,3
2018	300.956.292.901,00	-31,21

Sumber : APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.6 belanja tidak langsung dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan untuk Tahun 2018 sebesar 15,44% dan untuk Tahun 2017 sebesar 4,43%. yang menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dan berdasarkan tabel 4.7 belanja langsung dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan negatif untuk pertumbuhan Tahun 2018 menunjukkan pertumbuhan sebesar negatif 31,21% dan untuk Tahun 2017 sebesar 11,30%.

Tahun 2016-2018 belanja tidak langsung mangalami kenaikan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang tinggi dalam pembelanjaan pegawai. Pemebelanjaan pegawai dilakukan untuk mendukung program-program yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan hasil yang di dapatkan peneliti dari lapangan terkait dengan tingginya belanja tidak langsung salah satu faktor yang mempengaruhi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung adalah pemerintah masih mengutamakan kenaikan gaji para pegawai, yang sebenarnya dari data yang di dapatkan penelitian di lapangan

bahwa kinerja pegawai terkesan masih bermalas-malasan dapat dilihat dari jam kerja, pegawai yang hanya datang pada saat ketika pengambilan absen, pergi keluar pada saat jam kerja belum berakhir dan kembali lagi untuk mengisi absen pulang, dan biaya tak terduga pada saat mengadakan rapat instansi. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang dapat dinikmati langsung oleh publik. Sebagai daerah di negara berkembang peran pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan seharusnya relatif besar, namun rasio belanja langsung yang masih relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan dan memangkas anggaran yang tidak terlalu berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat atau setidaknya pertumbuhan belanja tidak langsung dan belanja langsung setara dalam mengeluarkan anggaran, dengan begitu akan terjadi pertumbuhan biaya belanja daerah yang efektif.

4.3 Analisis Belanja Sektor Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV pasal 10 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Pasal 11 mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta menjamin tersediaan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan usia lima belas.

Landasan tentang Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Kepulauan Talaud merumuskan beberapa misi pembangunan diantaranya mewujudkan peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan dapat tercapai dengan pelaksanaan belanja pendidikan. Berdasarkan pengukuran tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud didasarkan pada Laporan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016-2018, yang kemudian diklasifikasikan kembali sesuai dengan evaluasi

4.3.1. Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan mengalami peningkatan berdasarkan data melek huruf di Kabupaten Kepulauan Talaud mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2018. Perbaikan tingkat pendidikan tersebut didorong oleh meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Karena mencerminkan persentase banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok umur dan disetiap jenjang pendidikan. Kelompok umur tertentu yang masih bersekolah, sehingga dapat digunakan sebagai monitoring keberhasilan program 9 tahun. Tinggi randahnya angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni sangat tergantung pada banyaknya penduduk yang melanjutkan pendidikan/bersekolah. Dapat dilihat pada gambar 4.1 Persentase penduduk usia 7-24 Tahun menurut jenis kelamin kelompok umur sekolah, dan partisipasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Talaud dan pada gambar 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Gambar 4.1
Angka Partisipasi sekolah

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah <i>Sex and School Age Group</i>	Partisipasi Sekolah/School Participation		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi <i>Not Attending School Anymore</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki/Male			
7-12	2,12	97,88	-
13-15	-	92,65	7,35
16-18	1,39	61,68	36,93
19-24	3,64	7,72	88,64
7-24	1,92	67,55	30,54
Perempuan/Female			
7-12	-	100	-
13-15	-	100	-
16-18	-	78,89	21,11
19-24	3,25	16,90	79,85
7-24	0,88	73,82	25,30
Laki-laki + Perempuan/ Male+Female			
7-12	1,13	98,87	-
13-15	-	95,65	4,35
16-18	0,67	70,54	28,78
19-24	3,46	12,01	84,53
7-24	1,43	70,45	28,11

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Gambar 4.2

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Jenjang Pendidikan <i>Educational Level</i>	APM <i>Net Enrollment Rate</i>	APK <i>Gross Enrollment Rate</i>
(1)	(2)	(3)
SD/MI Elementary School	95,04	103,26
SMP/MTs Junior High School	82,29	88,72
SMA/SMK/MA Senior High School	70,54	86,86

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor, Maret 2018

Source : National Socio Economic Survey kor, March 2018

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan pada usia 7-24 Tahun berdasarkan pada jenis kelamin dan kelompok umur (laki-laki dan wanita) menunjukkan data yang tidak pernah bersekolah 1,43, yang masih sekolah 70,45, dan tidak sekolah 28,11. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase lebih banyak terdapat pada jenjang pendidika dasar (SD) dengan total 95,04 dan terendah terdapat pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan total 70,54. Dari hasil diatas menunjukkan Angka Partipasi murni pada jenjang SMA adalah yang terendah. Peneliti menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi berdasarkan hasil

penelitian di lapangan antara lain adalah jarak rumah ke sekolah sangat jauh, orang tua tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit, sehingga biaya-biaya yang cukup memberatkan adalah biaya personal yaitu buku, seragam, transportasi dan uang jajan. Kemampuan belajar anak yang rendah, didukung oleh rendahnya motivasi orang tua terhadap pendidikan (karena terkait dengan faktor ekonomi), dan dipengaruhi temannya juga yang tidak bersekolah. pandangan orang tua bahwa pendidikan bukan merupakan kebutuhan pokok, tamat SD saja sudah cukup karena banyak lulusan pendidikan tinggi yang menganggur.

4.3.2 Pencapaian Kinerja Pemerintah Dalam Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat (1) tentang Pendidikan Nasional. Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Dalam hal ini pemerintah daerah harus selalu konsisten dalam menyediakan pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan daerah sehingga dalam jangka panjang akan tercipta pertumbuhan daerah yang positif dan penurunan angka kemiskinan akan semakin sedikit.

Tabel 4.8

Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat pada Pendidikan

Program dan Kegiatan	Kinerja Keuangan		Hasil kinerja manfaat Bagi Masyarakat
	Anggaran	Realisasi	
Program Sarana dan Prasarana	1.609.503.250,00	1.591.504.500,00	Kinerja pemerintah dalam program sarana dan prasarana agar seluruh siswa dapat menikmati ruang/gedung sekolah yang nyaman untuk belajar. Namun pembangunan sarana dan prasarana yang di anggarkan masih belum optimal, karena tidak seluruh sekolah mendapatkan pembangunan yang merata dan masih terdapat juga kebocoran atap gedung dan kerusakan pada fasilitas sekolah.
Program Wajib Belajar 9 Tahun	21.526.294.552,00	11.903.963.576,00	Memberikan fasilitas gratis kepada siswa yang kurang mampu seperti buku, biaya spp, dan biaya iuran sekolah. Tetapi dari program tersebut ternyata tidak terlalu berpengaruh secara signifikan, karena siswa masih harus membayar buku, uang spp, dan iuran sekolah yang membebani para orang tua.

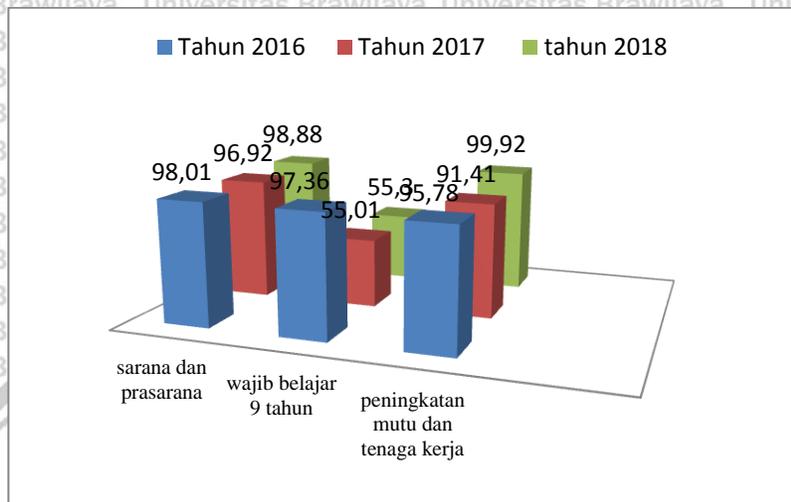
Tabel 4.8 (Lanjutan)

Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat pada Pendidikan

Program dan kegiatan	Kinerja Keuangan		Hasil kinerja manfaat bagi masyarakat
	Anggaran	Realisasi	
Program Peningkatan Mutu pendidikan dan Tenaga kependidikan	418.830.592,00	418.830.592,00	Dengan adanya peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan diharapkan mampu memberikan peningkatan kualitas pendidikan. Namun hasil yang didapatkan di lapangan menunjukkan manfaat yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan karena terdapat mata pelajar yang tidak diterapkan seperti mata pelajaran bahasa inggris, pada Kabupaten Kepulauan Talaud tidak menerapkan mata pelajaran bahasa inggris. Dan tenaga kependidikan (guru) hanya menerapkan proses belajar mengajar secara dasar tanpa mendorong para siswa untuk lebih kreatif lagi dalam mengasa potensi yang ada dalam diri mereka.

Sumber : Laporan Anggaran Kegiatan dinas pendidikan, data diolah (2020)

Grafik 4.1
Program Kegiatan Pemerintah dalam pendidikan



Sumber : Laporan Anggaran Kegiatan dinas pendidikan, data diolah (2020)

Program peningkatan sarana dan prasarana Tahun 2016 pada pembangunan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Beo (SMAN1), pengadaan kendaraan dinas/operasional, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan mebeleur, pengadaan computer, pemeliharaan rutin lapangan olahraga, rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, pembangunan gelenggan olahraga dan pembangunan lanjut gedung aula dinas pendidikan sebesar 98,01%. Sedangkan pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 96,92% untuk 4 kegiatan pembangunan, dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 98,88% untuk 7 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada Tahun 2016 pemerintah memiliki 7 kegiatan pembangunan gedung sekolah dengan total presentase sebesar 97,36%, sedangkan pada Tahun 2017 pemerintah memiliki 8 kegiatan pembangunan

sebesar 55,01%, dan pada Tahun 2018 pemerintah memiliki 8 kegiatan pembangunan sebesar 55,30%. Dari hasil tersebut menunjukkan pembangunan gedung sekolah dari tahun 2016, 2017, dan 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Program peningkatan mutu dan tenaga kependidikan Tahun 2016 memiliki program lima kecil yaitu, program pelaksanaan sertifikasi pendidik, pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sebesar 95,78% dan yang terdiri dari dua program tidak mendapatkan anggaran pemerintah yaitu program pelaksanaan uji kompetensi dan tenaga kependidikan, serta program pembangunan mutu dari kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan pada Tahun 2017 memiliki tiga program sebesar 91,41%, dan pada Tahun 2018 memiliki empat program dengan total sebesar 99,92%. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Dari seluruh Program/kegiatan yang dianggarkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, dapat di simpulkan dari ketiga sasaran program besar diatas yaitu, program peningkatan sarana dan prasarana, program wajib belajar dasar sembilan tahun, dan program peningkatan mutu dan tenaga pendidik. Pada Tahun 2018 program-program peningkatan mutu dan tenaga pendidik anggaran yang dikeluarkan sudah terealisasi sebesar 99,92% dibandingkan kedua program lainnya. Hasil menunjukkan bahwa tidak semua faktor pelayanan memperoleh benefit yang sama dari anggaran belanja pendidikan. Di bidang pendidikan cenderung lebih banyak

memberikan benefit bagi guru dan jumlah sekolah, dibandingkan dengan Angka Partisipasi Murni (APM). Rendahnya pengaruh belanja pendidikan terhadap pencapaian APM mengindikasikan bahwa belanja pendidikan cenderung lebih fokus pada sisi supply pendidikan (ketersediaan tenaga pengajar dan infrastruktur untuk bersekolah). Hasil ini sesuai dengan data belanja daerah yang terdapat dalam laporan tiga program dimana, dinas pendidikan yang menunjukkan bahwa komponen gaji tenaga pengajar merupakan bagian paling besar dari komposisi belanja fungsi pendidikan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud lebih banyak mengeluarkan biaya belanja di program pendidikan wajib belajar 9 tahun, fasilitas buku gratis, fasilitas seragam dan transportasi bus sekolah gratis bagi anak-anak untuk jarak tempu dari rumah ke sekolah terbilang jauh. Karna salah satu faktor menunjukan bahwa, APM dan APS lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kemiskinan, yang dapat menyebabkan anak dan orang tuanya memiliki insentif lebih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dibandingkan bersekolah. dari hasil diatas menunjukkan bahwa belanja pada dinas pendidikan di katakan kurang efektif pada program yang mengarah pada kapasitas sejahteraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan.

4.4. Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud

Kemiskinan adalah musuh bersama bagi tiap-tiap zaman. Tiap program pemerintah selalu diarahkan kepada pemberantasan kemiskinan, dana besar digerojokkan kedalam program pengantasan kemiskinan. Tetapi kemiskinan tetap saja terjadi, tentu ada yang salah dengan program tersebut. Pemetaan kantong-

kantong kemiskinan harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian bersama-sama dengan masyarakat dikawasan kemiskinan tersebut, pemerintah membuat perencanaan bersama (TRISAKTI: 2012).

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dipengaruhi oleh faktor : tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, gender dan kondisi lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan.

Grambar 4.3
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Kepulauan Talaud

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah TOTAL (ribu)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	265,839,00	8,68	9,50
2017	257 294,00	8,84	9,77
2016	246 757,00	9,22	10,29
2015	228 813,00	8,92	10,04
2014	212 477,00	8,74	9,92
2013	211 224,00	8,96	10,27
2012	208 832,00	7,80	9,06
2011	204 168,00	8,48	10,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Talaud
Source : Central Board Of Statistic Kepulauan Talaud Regency

Gambar 4.3 merupakan gambaran garis kemiskinan dan penduduk di Kabupaten Kepulauan Talaud. Persentase penduduk miskin di Kabupate Kepulauan Talaud pada Tahun 2018 adalah sebesar 9,50 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun lalu. Garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Tahun 2018 adalah Rp 265.893,00 yang merupakan batas minimum pendapatan untuk dikategori sebagai penduduk tidak miskin.

Di pedesaan wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud, sebab utama kemiskinan terutama di wilayah yang tergolong sangat miskin, yakni persoalan kepemilikan, kemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Tanah yang luas dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang yang secara jumlah sangat sedikit. Sedangkan masyarakat yang secara jumlah besar hanya menguasai sedikit tanah, sehingga terjadi kesenjangan sosial. Di wilayah pertanian kepemilikan sawa sebagian besar dikuasai oleh orang-orang yang berada di kota dan tidak mengantungkan hidupnya dari pertanian.

4.5. Pencapaian Kinerja Pemerintah dalam Kemiskinan

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, pengukuran capaian kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas dilaksanakan dengan cara melakukan

analisis berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas secara keseluruhan, dan pemberian peringkat (rating) terhadap instansi.

Indikator Kinerja yang dipakai untuk mengukur capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1, Peningkatan kualitas administrasi kantor melalui kinerja yang akurat, akuntabel, dan terpercaya.

Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui indikator-indikator :

- a) Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
- b) Jumlah dokumen SPJ yang dihasilkan
- c) Jumlah LAKIP, TAPKIN, LPPD, LPT yang dihasilkan
- d) Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan
- e) Persentase pengelolaan pembayaran gaji tepat jumlah, waktu, dan sasaran
- f) Persentase pemeliharaan kendaraan dinas
- g) Jumlah dokumen laporan Barang Miliki Daerah (BMD)/Aset.

2. Sasaran 2, Peningkatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan memberikan bantuan sosial berupa barang pabrikan bagi PMKS yang memiliki RTLH

Sasaran ini dapat diukur melalui indikator :

- 1) Jumlah Kepala Keluarga PMKS yang memiliki RTLH yang berhasil dibantu.
- 2) Jumlah keluarga penerima manfaat PKH yang terdata.

3. Sasaran 3, Peningkatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi korban bencana alam. Sasaran ini dapat diukur melalui indikator :

1) Persentase masalah-masalah strategis menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang berhasil ditangani.

4. Sasaran 4, Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial

Sasaran ini dapat diukur melalui indikator :

1) Jumlah pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan di 19 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Capaian Kinerja Pemerintah Kepulauan Talaud terhadap 4 sasaran dari 4 program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.9

Distribusi Sasaran Menurut Jumlah Program, Indikator Kinerja dan Kegiatan Indikator

Sasaran Strategis	Jumlah Program	Jumlah IK	Jumlah Kegiatan
1. Peningkatan kualitas administrasi kantor melalui kinerja yang akurat, akuntabel, dan terpercaya.	1	7	10
2. Peningkatan kesejahteraan sosial PMKS yang memiliki RTLH	1	1	2
3. Peningkatkan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi korban bencana alam	1	1	1
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial	1	1	1
4 Sasaran strategis	4 Program	10 IK	13 Keg

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020)

Analisis capaian kinerja terhadap 4 sasaran strategis, yang dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 dilakukan dengan pengkategorian (rating) pencapaian hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10
 Pengkategorian Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Kepulauan Talaud
 Tahun 2018

No	Kategori Capaian	Jumlah Kegiatan	%
1	BERHASIL (85 s/d 100)	12	99,03
2	CUKUP BERHASIL (70 s/d 84)	0	
3	KURANG BERHASIL (55 s/d 69)	0	
4	TIDAK BERHASIL (0 s/d 54)	1	49,61
	Jumlah	13	74,32

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian kinerja terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan strategis yang dilaksanakan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2018 belum mencapai target kinerja yang maksimal dan secara keseluruhannya di kategorikan cukup berhasil.

Uraian atas analisis capaian kinerja yang di fokuskan pada 4 (empat) sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Anggaran Tahun 2018

Tabel 4.11

Sasaran 1 “Peningkatan kualitas administrasi kantor melalui kinerja yang akurat, akuntabel, dan terpercaya

Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					399.521.600,-	383.910.048,-	96,09
1. Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dok	4	4	100			
2. Jumlah dokumen SPJ yang dihasilkan.	Dok	99	98	98			
3. Jumlah LAKIP, TAPKIN, LPPD, LPT yang dihasilkan	Dok	4	4	100			
4. Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan.	Dok	12	12	100			
5. Persentase pengelolaan pembayaran gaji tepat jumlah, waktu dan sasaran	%	100	100	100			
6. Persentase pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas	Dok	100	100	100			
7. Jumlah dokumen laporan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset	Bln	12	12	100			

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020)

Tabel 4.12

Sasaran 2 “Peningkatan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang memiliki RTLH”

Indikator Kinerja	Sat	Targe	Realis	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
B. Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya					6.168.500.000,	6.040.570.000,	97,93
1. Jumlah KK yang memiliki RTLH yang berhasil dibantu	K K	720	720	100			

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020)

Tabel 4.13

Sasaran 3 “Peningkatan perlindungan sosial jaminan sosial bagi masyarakat selama masa tanggap darurat”

Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
C. Pelayan Sosial dan Rehabilitasi Sosial							
1. Jumlah barang untuk persediaan dalam gudang rangka penanggulangan bencana sosial dan bencana alam	Trip	2	2	100	177.495.000,-	177.494.300,-	100

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020)

Tabel 4.14
 Sasaran 4 “Peningkatan SDM Kesejahteraan Sosial”

Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi	%	Anggaran		
					Pagu	Realisasi	%
D. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial					154.552.500,-	154.454.000,-	99,94
1. Jumlah pendamping PKH yang melaksanakan pendampingan di 19 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud	Orang	39	39	100			

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa indikator kinerja pencapaian sasaran telah tercapai dengan baik/berhasil.

Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kerja Kabupaten Kepulauan Talaud dalam tahun 2018 berasal dari pos Dana Alokasi Umum (DAU), dengan rincian berikut :

Tabel 4.15

Capaian Akuntabilitas Keuangan Kabupaten Kepulauan Talaud

ANGGARAN SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
APBD			
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
a. Gaji dan tunjangan	1.994.586.348,-	1.943.512.164,-	99,93
b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas	465.078.122,-	465.076.872,-	100
Jumlah	2.459.664.470	2.408.589.036	
BELANJA LANGSUNG			
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.521.600,-	383.910.048,-	96,09
b. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS lainnya	6.168.500.000,-	6.040.570.000	97,93
c. Program Pelayanan Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial	177.495.000,-	177.494.300,-	100
d. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	154.552.500	154.454.000,-	99,94
Jumlah	6.900.069.100,-	6.756.428.348,-	97,92
TOTAL	9.359.733.570,-	9.165.017.384,-	

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Talaud, data diolah (2020)

Tabel 4.16

Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Miskin

Program dan kegiatan	Kinerja Keuangan		Hasil kinerja manfaat bagi masyarakat
	Anggaran	Realisasi	
Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, KAT dan PMKS	6.168.500,00	6.040.570,000	Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, pemerintah memberikan sasaran target pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) agar masyarakat dapat tinggal dengan layak. Namun dalam program ini ternyata belum semua mendapatkan bantuan, hanya beberapa jumlah KK di setiap kecamatan saja yang bisa ditargetkan yang bisa menerima bantuan. Secara anggaran program ini sudah cukup efektif, tapi seharusnya program ini akan lebih efektif apabila pemerintah melakukan pemerataan kepada masyarakat-masyarakat di setiap kecamatan untuk mendapatkan bantuan (RTLH). Sehingga manfaat yang akan dirasakan masyarakat dapat dikatakan efektif.

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Tabel 4.16 (Lanjutan)

Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Miskin

Program dan kegiatan	Kinerja Keuangan		Hasil kinerja manfaat bagi masyarakat
	Anggaran	Realisasi	
Program Pelayanan Sosial dan Rehabilitas sosial	177.495.000	177.494.300	Dalam program pelayanan sosial dan rehabilitas sosial, Memberikan fasilitas gratis kepada masyarakat penyandang khusus yang tidak mempunyai biaya untuk berobat dan membeli alat medis seperti kursi roda atau alat medis lainnya, sehingga pemerintah memberikan bantuan biaya sesuai dengan yang telah di anggarkan. Dari program ini dan hasil di lapangan sudah di katakan berhasil, karena masyarakat penyandang khusus telah di data dan telah menerima bantuan yang telah di berikan pemerintah sesuai dengan yang dianggarkan dan telah terealisasi dengan baik. Maka dari itu pemerintah harus mempertahankan kinerja agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat untuk tidak putus semangat walaupun memiliki keterbatasan fisik.

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Tabel 4.16 (Lanjutan)

Hubungan Kinerja Keuangan Dan Kinerja Manfaat Bagi Masyarakat Miskin

Program dan kegiatan	Kinerja Keuangan		Hasil kinerja manfaat bagi masyarakat
	Anggaran	Realisasi	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	154.552.500	154.454.000	Dalam program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat diharapkan menciptakan dan memelihara rasa aman, nyaman, serta tata tertib dalam masyarakat untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Dalam program ini apa yang dianggarkan dan direalisasikan sudah cukup berhasil, namun dari hasil lapangan belum terasa efektif bagi masyarakat, di karenakan masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat langsung dalam program yang di buat pemerintah.

Sumber : Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, data diolah (2020)

Dari pengukuran capaian indikator-indikator di atas, indikator kinerja dari sasaran strategis dapat dikategorikan cukup berhasil dalam memberikan manfaat yang dapat dinikmati masyarakat. Karena dana anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Namun masih ada beberapa kekurangan yang harus di pantau kembali Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terkait dengan pendataan masyarakat untuk mendapatkan bantuan karena pada sasaran program pemberdayaan masyarakat miskin yang di dalamnya terdapat Program Rumah Layak Huni (RHLT) masih ada beberapa masyarakat (KK) di setiap kecamatan yang belum mendapatkan bantuan akibat anggaran yang di targetkan masih sangat terbatas. Oleh karena itu perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud perlu penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin di capai dan penetapan prioritas kegiatan. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Hal ini tentu berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan kualitas pembangunan manusia. Mardiaso (2002), menyatakan bahwa era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Sejalan dengan peningkatan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.

Dari Penelitian ini peneliti mengemukakan dari seluruh program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat akan mengurangi kemiskinan secara langsung, namun pada dasarnya faktor pendapat ajak dan retribusi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yang tinggi akan sangat menyulitkan masyarakat.

Dengan menggeserkan pendapatan pajak dan pengalihan kebijakan kepada masyarakat yang lebih rendah membawa masyarakat diatas garis kemiskinan. Karena pendapatan daerah dari hasil pajak dan retribusi yang tinggi akan membawa penurunan kemiskinan yang rendah. Sedangkan pengeluaran belanja yang lebih tinggi terhadap program kesejahteraan masyarakat, akan menurunkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Kesejahteraan sosial yang tinggi akan dapat mengurangi kemiskinan. Semakin tinggi belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah, semakin rendah juga tingkat kemiskinan dari daerah tersebut. Karena dalam teori keuangan publik mengekspektasikan hubungan terbalik (tidak searah) antara pembiayaan surplus (positif, pendapatan > belanja), maka kesejahteraan masyarakat menurun. Sebaliknya, pembiayaan defisit (negatif, pendapatan < belanja), maka kesejahteraan masyarakat meningkat. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud harus bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang tidak membebani masyarakat setempat. Kebijakan yang terarah dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan SDM yang lebih baik dan akan membawa pada pertumbuhan daerah yang efektif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja dan Pencapaian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam mengalokasikan dan merealisasikan dana anggaran daerah untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat masih belum optimal dapat dilihat hasil program pemerintah yang dimana terdapat dua faktor yaitu faktor pendidikan dan kemiskinan.

Dimana dari kedua faktor tersebut pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud masih belum bisa optimal dalam mengalokasikan dan merealisasikan dana, seperti dalam pembahasan diatas, pada program pendidikan seharusnya pemerintah mengutamakan program wajib belajar 9 tahun, karena dengan begitu masyarakat dapat menerima pelayanan pendidikan secara gratis tanpa perlu terbebani dengan biaya sekolah, biaya buku, dan biaya iuran sekolah dan akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) sehingga pendidikan di Kabupaten Kepulauan Talaud akan mengalami peningkatan kemajuan kualitas pendidikan, sedangkan pada tingkat kemiskinan meskipun terdapat program-program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, namun ternyata tidak sesuai dengan hasil lapangan dikarenakan sebagian masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut salah satu programnya yaitu program rumah tak layak huni (RTLH) dimana hanya beberapa kepala keluarga atau masyarakat yang dipilih saja yang menerima

bantuan dari program (RTLH). Dari penjelasan diatas, seharusnya dengan adanya pemerataan anggaran dana pada peningkatan program pendidikan dan program kesejahteraan masyarakat yang baik maka akan tercipta suatu pembangunan daerah dan sumber daya manusia yang efektif dan berkualitas dengan begitu akan menurunkan angka kemiskinan pada daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

5.2 Saran

Saran dari peneliti untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud yaitu perlu adanya penataan kembali permasalahan keuangan daerah dengan konsisten pada prinsip-prinsip tata kelolah pemerintah yang baik dan meningkatkan lagi efektivitas program/kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, seperti pada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah daerah harus mempunyai upaya sehingga tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah akibat adanya beban biaya dari sekolah yang menjadi salah satu faktor orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk bersekolah sehingga orang tua dan anak lebih memilih insentif untuk bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan dari pada bersekolah. Karena Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah kemiskinan, apabila masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang mudah, maka potensi untuk sumber daya manusia akan meningkat dan dengan adanya pemerataan bantuan program/kegiatan pemerintah, masyarakat dapat menikmati langsung manfaat dari hasil kinerja dan pencapaian pemerintah, dengan begitu dana anggaran yang dikeluarkan pemerintah akan terealisasi dengan baik dalam pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Antari, S., & Sedana, P. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Universitas Udayana Bali .

BAPPENAS. (2019). *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tertinggi*. Dipetik

September 18, 2019, dari Situs Resmi BAPPENAS:

<https://www.bappenas.go.id>

Badan Pusat Statistika [BPS]. 2016. *Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud 2016*.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud.

Badan Pusat Statistika [BPS]. 2017. *Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud 2017*.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud.

Badan Pusat Statistika [BPS]. 2018. *Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud 2018*.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bastian, I. (2007). *Sistem Akutansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Belva, A. (2019). *Keteringgalan Pendidikan Indonesia*. Dipetik Agsutus 6, 2019,

dari kompas: www.kompas.com

Berlian, N (2011). *Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Rendahnya Pencapaian Wajib*

Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Budaya*, Vol 17,

No 1.

Darinsya, Y (2014). *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja*

Daerah (APBD) Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2012. *Jurnal FISIP Universitas*

Riau.

Golgota, Ledy (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Talaud. Jurnal FEB Universitas Sam Ratulangi Manado.

Halim, A. (2007). *Akutansi Sektor Publik : Akutansi Keuangan Daerah*. Jakarta:

Salemba Empat.

Haryanto. (2012). Dipetik 7 21, 2019, dari belajarpsikologi.com:

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/>

Haryanto. (2012). *Kemiskinan dan Permasalahan di Pedesaan*. Dipetik Juli 21, 2019,

dari haryharyanto.wordpress.com: <http://haryharyanto.wordpress.com>

Indra, B. (2001). *Akutansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit

Erlangga.

Irwanto. M (2014). Evaluasi Keberhasilan Kinerja Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2010.

Jurnal FEB Universitas Brawijaya Malang.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Dearah*. Yogyakarta: Andi.

Martini, N.(2016). Eksplorasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar.

Jurnal Psikologi Ilmiah, 8(1)

Moleong. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nugroho, S. (2009). *Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten*

Wonogiri Dan Kabupaten Karanganyar Dalam Pelaksanaan Otonomi

Daerah. Skripsi Universitas Muhamadiyah Surakarta.

Pratidina , M. (2012). *Kinerja Keuangan Pemerintah Serta Tingkat Pendidikan,*

Tingkat Kesehatan, dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Blitar Tahun

2008-2010. Skripsi Universitas Brawijaya Malang.

Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Pengelolaan Keuangan Daerah. Menteri Dalam Negeri. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003. Sistem pendidikan Nasional. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2019. Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2003. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2003. Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004. Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 14

Tahun 2016. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2017. Pemkab. Kabupaten Kepulauan Talaud.

Safriansyah, R., & Masyarafah, H. (2013). *Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program*. Skripsi Biannual International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies Banda Aceh.

Suhariyanto. (2018). *Standar Garis Kemiskinan Indonesia di Atas Bank Dunia*.

Dipetik September 18, 2019, dari Situs Resmi Kumparn Bisnis:

<https://kumparan.com>



Widiyanto, B (2019). Analisis Belanja Publik Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di kabupaten Brebes. Buku Paduan. Cetakan Pertama Tim Nasioanl Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Wongindaan , M. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Skripsi Universitas Samratulangi Manado.



Lampiran 1. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN

BERDASARKAN KLASIFIKASI SUMBER DANA
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016

Urusan Pemerintahan : 1.01
Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01
Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 . 01

Urusan Wajib Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

KODE REKENTING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
	Dana Alokasi Umum (D A U)				
5	BELANJA	14.606.144.527,00	0,00	14.137.876.322,00	14.137.876.32
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.598.054.627,00	0,00	3.574.470.252,00	3.574.470.25
5.1.1	Belanja Pegawai	3.598.054.627,00	0,00	3.574.470.252,00	3.574.470.25
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.182.608.377,00	0,00	3.180.108.377,00	3.180.108.37
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.358.483.400,00	0,00	2.356.483.400,00	2.356.483.40
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	233.335.472,00	0,00	232.835.472,00	232.835.47
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	172.505.000,00	0,00	172.505.000,00	172.505.00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	137.025.000,00	0,00	137.025.000,00	137.025.00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	42.045.000,00	0,00	42.045.000,00	42.045.00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	134.194.260,00	0,00	134.194.260,00	134.194.26
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.418.198,00	0,00	28.418.198,00	28.418.19
5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	31.396,00	0,00	31.396,00	31.39
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	66.719.187,00	0,00	66.719.187,00	66.719.18
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.378.497,00	0,00	4.378.497,00	4.378.49
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian	5.472.967,00	0,00	5.472.967,00	5.472.96
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	415.446.250,00	0,00	394.361.875,00	394.361.87
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	415.446.250,00	0,00	394.361.875,00	394.361.87
5.2	BELANJA LANGSUNG	11.008.089.900,00	0,00	10.563.406.070,00	10.563.406.07
5.2.1	Belanja Pegawai	1.925.850.000,00	0,00	1.735.630.000,00	1.735.630.00
5.2.1.01	Honorarium PNS	30.630.000,00	0,00	30.630.000,00	30.630.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.630.000,00	0,00	30.630.000,00	30.630.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.608.000.000,00	0,00	1.605.000.000,00	1.605.000.00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	1.608.000.000,00	0,00	1.605.000.000,00	1.605.000.00
5.2.1.03	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	287.220.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000.00
5.2.1.05.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Printed by: SunLD



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	287.220.000,00	0,00	100.000.000,00	100.000,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.396.612.550,00	0,00	4.246.532.955,00	4.246.532,95
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.514.100,00	0,00	131.881.465,00	131.881,46
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	104.167.700,00	0,00	103.143.465,00	103.143,46
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.286.000,00	0,00	10.770.000,00	10.770,00
5.2.2.01.04	Belanja Peranko, Material Dan Benda Pos Lainnya	8.279.000,00	0,00	8.191.000,00	8.191,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.781.400,00	0,00	9.777.000,00	9.777,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.550.000,00	0,00	86.403.800,00	86.403,80
5.2.2.03.02	Belanja Air	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	0,00	7.853.800,00	7.853,80
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	61.050.000,00	0,00	61.050.000,00	61.050,00
5.2.2.03.12	Jasa narasumber/tenaga ahli	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	12.100,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.000.000,00	0,00	38.147.500,00	38.147,50
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	0,00	3.659.500,00	3.659,50
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	0,00	3.226.000,00	3.226,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000,00
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.000.000,00	0,00	262.000,00	262,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.962.500,00	0,00	57.361.600,00	57.361,60
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.450.800,00	0,00	5.606.000,00	5.606,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	52.511.700,00	0,00	51.755.600,00	51.755,60
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	35.500,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	35.500,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.750.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.750.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	306.342.000,00	0,00	300.769.600,00	300.769,60
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	132.419.000,00	0,00	131.367.600,00	131.367,60
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	173.923.000,00	0,00	169.402.000,00	169.402,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,00	0,00	0,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.500.000,00	0,00	28.968.000,00	28.968,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	33.500.000,00	0,00	28.968.000,00	28.968,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.593.979.150,00	0,00	1.521.872.900,00	1.521.872,90

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBAYARAN

Printed By Simba



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	703.181.500,00	0,00	674.570.150,00	674.570.15
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	890.797.650,00	0,00	847.302.750,00	847.302.75
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.750.000,00	0,00	5.250.000,00	5.250.00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.750.000,00	0,00	5.250.000,00	5.250.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	77.759.600,00	0,00	77.300.000,00	77.300.00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	77.759.600,00	0,00	77.300.000,00	77.300.00
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.995.505.200,00	0,00	1.951.078.090,00	1.951.078.09
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	246.690.700,00	0,00	246.652.870,00	246.652.87
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.748.814.500,00	0,00	1.704.425.220,00	1.704.425.22
5.2.3	Belanja Modal	4.685.627.350,00	0,00	4.581.243.115,00	4.581.243.11
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.700.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	63.745.000,00	0,00	63.691.485,00	63.691.48
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	53.795.000,00	0,00	53.742.260,00	53.742.26
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	9.950.000,00	0,00	9.949.225,00	9.949.22
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	285.996.350,00	0,00	285.740.730,00	285.740.73
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	166.438.000,00	0,00	166.318.405,00	166.318.40
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	52.865.600,00	0,00	52.813.750,00	52.813.75
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	66.692.750,00	0,00	66.608.575,00	66.608.57
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	106.292.500,00	0,00	105.974.650,00	105.974.65
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	14.833.500,00	0,00	14.825.800,00	14.825.80
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	10.777.000,00	0,00	10.746.150,00	10.746.15
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.832.000,00	0,00	9.816.400,00	9.816.40
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	54.210.000,00	0,00	53.976.850,00	53.976.85
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	16.640.000,00	0,00	16.609.450,00	16.609.45
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.552.208.500,00	0,00	3.494.584.250,00	3.494.584.25

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBAYARAN

2016-2017

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	614.231.500,00	0,00	584.493.250,00	584.493.25
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	931.406.000,00	0,00	931.272.000,00	931.272.00
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.006.571.000,00	0,00	1.978.819.000,00	1.978.819.00
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.740.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.00
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	7.740.000,00	0,00	7.700.000,00	7.700.00
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	150.945.000,00	0,00	146.095.000,00	146.095.00
5.2.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	150.945.000,00	0,00	146.095.000,00	146.095.00
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	500.000.000,00	0,00	477.457.000,00	477.457.00
5.2.3.85.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	500.000.000,00	0,00	477.457.000,00	477.457.00
Dana Alokasi Khusus (D A K)					
5	BELANJA	58.908.815.000,00	0,00	51.616.063.395,00	51.616.063.39
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	53.288.815.000,00	0,00	46.113.634.895,00	46.113.634.89
5.1.1	Belanja Pegawai	53.288.815.000,00	0,00	46.113.634.895,00	46.113.634.89
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	52.386.015.000,00	0,00	45.277.948.665,00	45.277.948.66
5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru	52.386.015.000,00	0,00	45.277.948.665,00	45.277.948.66
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	902.800.000,00	0,00	835.686.230,00	835.686.23
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru	902.800.000,00	0,00	835.686.230,00	835.686.23
5.2	BELANJA LANGSUNG	5.620.000.000,00	0,00	5.502.428.500,00	5.502.428.50
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.843.470.000,00	0,00	2.782.832.500,00	2.782.832.50
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.843.470.000,00	0,00	2.782.832.500,00	2.782.832.50
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.197.920.000,00	0,00	1.141.685.000,00	1.141.685.00
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.645.550.000,00	0,00	1.641.147.500,00	1.641.147.50
5.2.3	Belanja Modal	2.776.530.000,00	0,00	2.719.596.000,00	2.719.596.00
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	552.760.000,00	0,00	538.000.000,00	538.000.00
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	552.760.000,00	0,00	538.000.000,00	538.000.00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.488.010.000,00	0,00	1.488.010.000,00	1.488.010.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBAYARAN

Printed By Simba

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.292.510.000,00	0,00	1.292.510.000,00	1.292.510,00
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	195.500.000,00	0,00	195.500.000,00	195.500,00
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	183.000.000,00	0,00	183.000.000,00	183.000,00
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	183.000.000,00	0,00	183.000.000,00	183.000,00
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	552.760.000,00	0,00	510.586.000,00	510.586,00
5.2.3.84.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)	552.760.000,00	0,00	510.586.000,00	510.586,00
SILPA					
5	BELANJA	9.218.319.490,41	0,00	3.309.731.630,00	3.309.731,63
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.879.489.120,41	0,00	0,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	5.879.489.120,41	0,00	0,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.879.489.120,41	0,00	0,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru (SILPA)	5.879.489.120,41	0,00	0,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	3.338.830.370,00	0,00	3.309.731.630,00	3.309.731,63
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	743.472.970,00	0,00	718.316.930,00	718.316,93
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	743.472.970,00	0,00	718.316.930,00	718.316,93
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	743.472.970,00	0,00	718.316.930,00	718.316,93
5.2.3	Belanja Modal	2.595.357.400,00	0,00	2.591.414.700,00	2.591.414,70
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.342.652.700,00	0,00	1.338.710.000,00	1.338.710,00
5.2.3.37.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas	747.057.700,00	0,00	743.500.000,00	743.500,00
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS	189.000.000,00	0,00	188.900.000,00	188.900,00
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	166.595.000,00	0,00	166.450.000,00	166.450,00
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	240.000.000,00	0,00	239.860.000,00	239.860,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.154.144.700,00	0,00	1.154.144.700,00	1.154.144,70
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	134.342.700,00	0,00	134.342.700,00	134.342,70
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	1.019.802.000,00	0,00	1.019.802.000,00	1.019.802,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBAYARAN

Printed by Sim00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempot Tinggal	98.560.000,00	0,00	98.560.000,00	98.560,00
5.2.3.50.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	98.560.000,00	0,00	98.560.000,00	98.560,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBAYARAN

Printed By SunD

Lampiran 2. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 . 01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN - LRA	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
4.3.3.01	Pendapatan Lainnya - LRA	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
4.3.3.01.01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
5	BELANJA	64.781.343.531,00	0,00	53.790.120.089,00	53.790.120.089,00	(10.991.223.442,00)
5.1	BELANJA OPERASI	50.567.907.425,00	0,00	40.506.847.649,00	40.506.847.649,00	(10.061.059.776,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	35.653.115.375,00	0,00	34.784.956.702,00	34.784.956.702,00	(868.158.673,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	34.182.209.125,00	0,00	33.407.064.827,00	33.407.064.827,00	(775.144.298,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.988.533.100,00	0,00	1.979.488.100,00	1.979.488.100,00	(9.045.000,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	188.761.278,00	0,00	187.575.878,00	187.575.878,00	-(1.185.400,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	191.505.000,00	0,00	191.505.000,00	191.505.000,00	0,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	54.489.000,00	0,00	53.039.000,00	53.039.000,00	(1.450.000,00)
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	43.820.000,00	0,00	43.820.000,00	43.820.000,00	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	117.754.920,00	0,00	117.320.400,00	117.320.400,00	(434.520,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.520.508,00	0,00	7.498.566,00	7.498.566,00	(21.942,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	29.097,00	0,00	28.977,00	28.977,00	(120,00)
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	56.374.683,00	0,00	56.070.771,00	56.070.771,00	(303.912,00)
5.1.1.01.21	Belanja Tunjangan Profesi Guru	31.524.217.000,00	0,00	30.761.562.440,00	30.761.562.440,00	(762.654.560,00)
5.1.1.01.22	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.090.946,00	0,00	4.069.238,00	4.069.238,00	(21.708,00)
5.1.1.01.23	Belanja Iuran Jaminan Kematian	5.113.593,00	0,00	5.086.457,00	5.086.457,00	(27.136,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.470.906.250,00	0,00	1.377.891.875,00	1.377.891.875,00	(93.014.375,00)
5.1.1.02.02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	363.906.250,00	0,00	361.204.375,00	361.204.375,00	(2.701.875,00)
5.1.1.02.06	Belanja Tambahan Penghasilan Guru	1.107.000.000,00	0,00	1.016.687.500,00	1.016.687.500,00	(90.312.500,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.914.792.050,00	0,00	5.721.890.947,00	5.721.890.947,00	(9.192.901.103,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	148.620.200,00	0,00	140.523.369,00	140.523.369,00	(8.096.831,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	146.095.200,00	0,00	137.998.369,00	137.998.369,00	(8.096.831,00)
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 4

Printed By Sunda

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	324.050.000,00	0,00	303.287.400,00	303.287.400,00	(20.762.600,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	0,00	8.837.400,00	8.837.400,00	(1.962.600,00)
5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
5.1.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	231.000.000,00	0,00	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00
5.1.2.03.12	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	75.100.000,00	0,00	56.300.000,00	56.300.000,00	(18.800.000,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	83.161.100,00	0,00	42.346.984,00	42.346.984,00	(40.814.116,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	11.131.600,00	0,00	3.092.011,00	3.092.011,00	(8.039.589,00)
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.339.500,00	0,00	13.817.873,00	13.817.873,00	(21.521.627,00)
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	35.000.000,00	0,00	23.753.000,00	23.753.000,00	(11.247.000,00)
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.690.000,00	0,00	1.684.100,00	1.684.100,00	(5.900,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.094.200,00	0,00	109.194.292,00	109.194.292,00	(8.899.908,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	41.693.800,00	0,00	34.935.185,00	34.935.185,00	(6.758.615,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	76.400.400,00	0,00	74.259.107,00	74.259.107,00	(2.141.293,00)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	91.500.000,00	0,00	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00
5.1.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	91.500.000,00	0,00	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.860.700,00	0,00	9.860.700,00	9.860.700,00	0,00
5.1.2.10.04	Belanja Sewa Generator	9.860.700,00	0,00	9.860.700,00	9.860.700,00	0,00
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	326.963.000,00	0,00	325.507.669,00	325.507.669,00	(1.455.331,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	90.785.000,00	0,00	89.876.964,00	89.876.964,00	(908.036,00)
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	236.178.000,00	0,00	235.630.705,00	235.630.705,00	(547.295,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.986.000,00	0,00	4.986.000,00	4.986.000,00	0,00
5.1.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	4.986.000,00	0,00	4.986.000,00	4.986.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.577.337.050,00	0,00	1.540.433.133,00	1.540.433.133,00	(36.903.917,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	693.332.750,00	0,00	676.809.600,00	676.809.600,00	(16.523.150,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	884.004.300,00	0,00	863.623.533,00	863.623.533,00	(20.380.767,00)
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.19.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.725.929.800,00	0,00	2.723.361.400,00	2.723.361.400,00	(2.568.400,00)
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	327.394.400,00	0,00	327.112.000,00	327.112.000,00	(282.400,00)
5.1.2.20.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.398.535.400,00	0,00	2.396.249.400,00	2.396.249.400,00	(2.286.000,00)
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS	46.890.000,00	0,00	46.890.000,00	46.890.000,00	0,00
5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.890.000,00	0,00	46.890.000,00	46.890.000,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 4

Printed By: Sidiq

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS ✓	381.000.000,00	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00
5.1.2.26.02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap ✓	381.000.000,00	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS ✓	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS ✓	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	14.213.436.106,00	0,00	13.283.272.440,00	13.283.272.440,00	(930.163.666,00)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	99.510.000,00	0,00	96.550.000,00	96.550.000,00	(2.960.000,00)
5.2.1.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	99.510.000,00	0,00	96.550.000,00	96.550.000,00	(2.960.000,00)
5.2.1.13.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	99.510.000,00	0,00	96.550.000,00	96.550.000,00	(2.960.000,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.013.276.599,00	0,00	567.882.500,00	567.882.500,00	(445.394.099,00)
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	56.000.000,00	0,00	55.563.000,00	55.563.000,00	(437.000,00)
5.2.2.14.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	56.000.000,00	0,00	55.563.000,00	55.563.000,00	(437.000,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	387.990.000,00	0,00	362.472.000,00	362.472.000,00	(25.518.000,00)
5.2.2.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	383.490.000,00	0,00	357.972.000,00	357.972.000,00	(25.518.000,00)
5.2.2.15.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	419.286.599,00	0,00	0,00	0,00	(419.286.599,00)
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	419.286.599,00	0,00	0,00	0,00	(419.286.599,00)
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	150.000.000,00	0,00	149.847.500,00	149.847.500,00	(152.500,00)
5.2.2.24.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	150.000.000,00	0,00	149.847.500,00	149.847.500,00	(152.500,00)
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.732.315.931,00	0,00	12.568.954.940,00	12.568.954.940,00	(163.360.991,00)
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.867.043.443,00	0,00	11.703.682.540,00	11.703.682.540,00	(163.360.903,00)
5.2.3.01.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	746.058.744,00	0,00	731.443.744,00	731.443.744,00	(14.615.000,00)
5.2.3.01.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	610.156.840,00	0,00	518.633.280,00	518.633.280,00	(91.523.560,00)
5.2.3.01.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	50.000.000,00	0,00	47.527.000,00	47.527.000,00	(2.473.000,00)
5.2.3.01.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.113.969.617,00	0,00	1.098.646.000,00	1.098.646.000,00	(15.323.617,00)
5.2.3.01.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.837.173.742,00	0,00	5.831.020.016,00	5.831.020.016,00	(6.153.726,00)
5.2.3.01.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	3.409.684.500,00	0,00	3.379.684.500,00	3.379.684.500,00	(30.000.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 3 dari 4

Printed By Siregar

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.01.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	0,00	96.728.000,00	96.728.000,00	(3.272.000,00)
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	865.272.488,00	0,00	865.272.400,00	865.272.400,00	(88,00)
5.2.3.02.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	865.272.488,00	0,00	865.272.400,00	865.272.400,00	(88,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	368.333.576,00	0,00	49.885.000,00	49.885.000,00	(318.448.576,00)
5.2.5.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	318.333.576,00	0,00	0,00	0,00	(318.333.576,00)
5.2.5.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	318.333.576,00	0,00	0,00	0,00	(318.333.576,00)
5.2.5.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	50.000.000,00	0,00	49.885.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)
5.2.5.04.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian	50.000.000,00	0,00	49.885.000,00	49.885.000,00	(115.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(55.707.943.531,00)	0,00	(53.790.120.089,00)	(53.790.120.089,00)	1.917.823.442,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(55.707.943.531,00)	0,00	(53.790.120.089,00)	(53.790.120.089,00)	1.917.823.442,00

Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01 . 01		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	78.159.707.028,00	0,00	61.675.932.639,00	61.675.932.639,00	(16.483.774.389,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	51.006.826.209,00	0,00	44.389.053.489,00	44.389.053.489,00	(6.617.772.720,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	51.006.826.209,00	0,00	44.389.053.489,00	44.389.053.489,00	(6.617.772.720,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	48.517.491.521,00	0,00	42.577.105.051,00	42.577.105.051,00	(5.940.386.470,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.039.494.500,00	0,00	2.039.494.500,00	2.039.494.500,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	216.209.938,00	0,00	215.709.938,00	215.709.938,00	(500.000,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	201.810.000,00	0,00	201.810.000,00	201.810.000,00	0,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	65.545.000,00	0,00	65.545.000,00	65.545.000,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	47.240.000,00	0,00	47.240.000,00	47.240.000,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	117.682.500,00	0,00	117.682.500,00	117.682.500,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.009.778,00	0,00	3.009.778,00	3.009.778,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.877,00	0,00	27.877,00	27.877,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	57.568.834,00	0,00	57.568.834,00	57.568.834,00	0,00
5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru	38.550.110.000,00	0,00	34.252.454.560,00	34.252.454.560,00	(4.297.655.440,00)
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	4.136.877,00	0,00	4.136.877,00	4.136.877,00	0,00
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian	11.835.217,00	0,00	11.835.217,00	11.835.217,00	0,00
5.1.1.01.24	Tunjangan Khusus Guru	4.052.821.000,00	0,00	2.457.790.560,00	2.457.790.560,00	(1.595.030.440,00)
5.1.1.01.25	Tunjangan Profesi Guru (SILPA)	3.150.000.000,00	0,00	3.102.799.410,00	3.102.799.410,00	(47.200.590,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.489.334.688,00	0,00	1.811.948.438,00	1.811.948.438,00	(677.386.250,00)
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	733.334.688,00	0,00	731.948.438,00	731.948.438,00	(1.386.250,00)
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Guru	1.356.000.000,00	0,00	747.000.000,00	747.000.000,00	(609.000.000,00)
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Guru (SILPA)	400.000.000,00	0,00	333.000.000,00	333.000.000,00	(67.000.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	27.152.880.819,00	0,00	17.286.879.150,00	17.286.879.150,00	(9.866.001.669,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	26.790.000,00	0,00	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	26.790.000,00	0,00	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.150.000,00	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00	11.640.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	18.659.373.337,00	0,00	8.912.656.918,00	8.912.656.918,00	(9.746.716.419,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.345.477,00	0,00	194.719.245,00	194.719.245,00	(3.626.232,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed By Simba

Halaman 1 dari 4



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.711.477,00	0,00	173.085.245,00	173.085.245,00	(3.626.232,00)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.330.000,00	0,00	9.330.000,00	9.330.000,00	0,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.304.000,00	0,00	12.304.000,00	12.304.000,00	0,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.397.192.000,00	0,00	1.358.636.500,00	1.358.636.500,00	(38.555.500,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.600.000,00	0,00	8.144.500,00	8.144.500,00	(4.455.500,00)
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.800.000,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	(900.000,00)
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.2.2.03.12	Jasa narasumber/tenaga ahli	977.792.000,00	0,00	977.592.000,00	977.592.000,00	(200.000,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas	336.000.000,00	0,00	304.500.000,00	304.500.000,00	(31.500.000,00)
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pengamanan	18.000.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	(1.500.000,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	145.030.000,00	0,00	141.052.600,00	141.052.600,00	(3.977.400,00)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	27.280.000,00	0,00	27.280.000,00	27.280.000,00	0,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.750.000,00	0,00	47.750.000,00	47.750.000,00	0,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	6.500.000,00	0,00	2.522.600,00	2.522.600,00	(3.977.400,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.078.800,00	0,00	229.373.033,00	229.373.033,00	(10.705.767,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	33.629.000,00	0,00	27.354.400,00	27.354.400,00	(6.274.600,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	206.449.800,00	0,00	202.018.633,00	202.018.633,00	(4.431.167,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	129.500.000,00	0,00	84.500.000,00	84.500.000,00	(45.000.000,00)
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	129.500.000,00	0,00	84.500.000,00	84.500.000,00	(45.000.000,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.900.000,00	0,00	14.768.000,00	14.768.000,00	(4.132.000,00)
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.700.000,00	0,00	13.568.000,00	13.568.000,00	(4.132.000,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	582.353.580,00	0,00	506.903.000,00	506.903.000,00	(75.450.580,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	368.782.580,00	0,00	293.345.000,00	293.345.000,00	(75.437.580,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	213.571.000,00	0,00	213.558.000,00	213.558.000,00	(13.000,00)
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.150.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	(30.000,00)
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	3.150.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	(30.000,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.428.399.712,00	0,00	2.141.131.182,00	2.141.131.182,00	(287.268.530,00)
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.003.396.500,00	0,00	888.714.700,00	888.714.700,00	(114.681.800,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.425.003.212,00	0,00	1.252.416.482,00	1.252.416.482,00	(172.586.730,00)
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH

Halaman 2 dari 4

Umbu Pa Simbu

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	57.800.000,00	0,00	57.000.000,00	57.000.000,00	(800.000,00)
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.800.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	(800.000,00)
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(9.073.400.000,00)
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.344.523.768,00	0,00	4.140.803.358,00	4.140.803.358,00	(203.720.410,00)
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.299.892.000,00	0,00	1.287.403.873,00	1.287.403.873,00	(12.488.127,00)
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	3.044.631.768,00	0,00	2.853.399.485,00	2.853.399.485,00	(191.232.283,00)
5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	27.200.000,00	0,00	27.150.000,00	27.150.000,00	(50.000,00)
5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	27.200.000,00	0,00	27.150.000,00	27.150.000,00	(50.000,00)
5.2.3	Belanja Modal	8.466.717.482,00	0,00	8.347.432.232,00	8.347.432.232,00	(119.285.250,00)
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	0,00	99.770.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.000.000,00	0,00	99.770.000,00	99.770.000,00	(230.000,00)
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.480.096.250,00	0,00	7.361.538.500,00	7.361.538.500,00	(118.557.750,00)
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.122.750,00	0,00	0,00	0,00	(7.122.750,00)
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	703.840.000,00	0,00	703.840.000,00	703.840.000,00	0,00
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.006.794.000,00	0,00	4.915.659.000,00	4.915.659.000,00	(91.135.000,00)
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	592.885.500,00	0,00	592.885.500,00	592.885.500,00	0,00
5.2.3.49.19	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	1.019.454.000,00	0,00	1.019.454.000,00	1.019.454.000,00	0,00
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.000.000,00	0,00	129.700.000,00	129.700.000,00	(20.300.000,00)
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	671.305.232,00	0,00	671.067.732,00	671.067.732,00	(237.500,00)
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	671.305.232,00	0,00	671.067.732,00	671.067.732,00	(237.500,00)
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	127.316.000,00	0,00	127.316.000,00	127.316.000,00	0,00
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	127.316.000,00	0,00	127.316.000,00	127.316.000,00	0,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 3 dari 4



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.3.74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00	0,00	49.740.000,00	49.740.000,00	(260.000,00)
5.2.3.74.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	50.000.000,00	0,00	49.740.000,00	49.740.000,00	(260.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(78.159.707.028,00)	0,00	(61.675.932.639,00)	(61.675.932.639,00)	16.483.774.389,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(78.159.707.028,00)	0,00	(61.675.932.639,00)	(61.675.932.639,00)	16.483.774.389,00

Lampiran 4. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MCDAL	TOTAL		
1.01	1.01.01.01.01	1.275.934.500,00	96.480.000,00	1.114.632.820,00	46.046.000,00	1.257.158.820,00	98,93	18.775.680,00
1.01	1.01.01.01.01.01	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	100,00	0,00
1.01	1.01.01.01.01.02	78.450.000,00	0,00	74.303.800,00	0,00	74.303.800,00	94,71	4.146.200,00
1.01	1.01.01.01.01.06	51.000.000,00	0,00	38.147.500,00	0,00	38.147.500,00	74,80	12.852.500,00
1.01	1.01.01.01.01.08	45.731.400,00	36.000.000,00	9.777.000,00	0,00	45.777.000,00	99,99	4.000,00
1.01	1.01.01.01.01.09	5.730.000,00	0,00	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00	91,60	500.000,00
1.01	1.01.01.01.01.10	70.617.100,00	0,00	70.516.700,00	0,00	70.516.700,00	100,00	400,00
1.01	1.01.01.01.01.11	33.689.000,00	0,00	33.308.000,00	0,00	33.308.000,00	98,93	381.000,00
1.01	1.01.01.01.01.12	11.286.000,00	0,00	10.770.000,00	0,00	10.770.000,00	95,43	516.000,00
1.01	1.01.01.01.01.13	104.278.000,00	0,00	98.182.170,00	46.046.000,00	104.208.170,00	99,93	69.830,00
1.01	1.01.01.01.01.17	93.499.000,00	0,00	93.062.000,00	0,00	93.062.000,00	99,58	437.000,00
1.01	1.01.01.01.01.18	339.242.000,00	0,00	339.495.630,00	0,00	339.495.630,00	100,04	(150.630,00)
1.01	1.01.01.01.01.20	378.039.000,00	0,00	377.960.000,00	0,00	377.960.000,00	99,98	79.000,00
1.01	1.01.01.01.01.21	60.400.000,00	60.480.000,00	0,00	0,00	60.480.000,00	100,00	0,00
1.01	1.01.01.01.02	1.894.451.350,00	0,00	87.447.500,00	1.867.133.635,00	1.854.681.135,00	98,01	39.770.195,00
1.01	1.01.01.01.02.05	18.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700.000,00
1.01	1.01.01.01.02.09	160.895.000,00	0,00	0,00	156.044.225,00	156.044.225,00	96,99	4.850.775,00
1.01	1.01.01.01.02.10	110.018.500,00	0,00	0,00	109.769.630,00	109.769.630,00	99,71	248.870,00
1.01	1.01.01.01.02.11	149.918.350,00	0,00	0,00	149.778.530,00	149.778.530,00	99,91	139.820,00
1.01	1.01.01.01.02.31	87.447.500,00	0,00	87.447.500,00	0,00	87.447.500,00	100,00	0,00
1.01	1.01.01.01.02.42	130.000.000,00	0,00	0,00	129.829.250,00	129.829.250,00	99,82	170.750,00
1.01	1.01.01.01.02.52	1.019.802.000,00	0,00	0,00	1.019.802.000,00	1.019.802.000,00	100,00	0,00
1.01	1.01.01.01.02.63	98.560.000,00	0,00	0,00	98.560.000,00	98.560.000,00	100,00	0,00
1.01	1.01.01.01.02.67	199.041.000,00	0,00	0,00	193.490.000,00	193.490.000,00	97,19	5.551.000,00
1.01	1.01.01.01.03	37.180.000,00	0,00	37.165.700,00	0,00	37.165.700,00	99,96	14.300,00
1.01	1.01.01.01.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	1.01.01.01.03.05	37.180.000,00	0,00	37.165.700,00	0,00	37.165.700,00	99,96	14.300,00
1.01	1.01.01.01.05	33.003.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	97,57	803.000,00
1.01	1.01.01.01.05.02	33.003.000,00	0,00	32.200.000,00	0,00	32.200.000,00	97,57	803.000,00
1.01	1.01.01.01.12	306.574.200,00	0,00	266.104.800,00	0,00	266.104.800,00	86,80	40.469.400,00

Halaman 1 dari 1

DIREKORA 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAJAI	BARANG & JASA	MCGAL	TOTAL		
1.01.1.01.01.11.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi belajar dalam olahraga	306.574.200,00	0,00	286.104.800,00	0,00	386.174.800,00	60,00	40.969.400,00
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.130.951.700,00	1.535.200.000,00	577.955.700,00	12.174.000,00	2.125.329.700,00	99,74	5.622.000,00
1.01.1.01.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	91.218.200,00	11.200.000,00	80.118.200,00	0,00	91.218.200,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.616.868.000,00	1.524.100.000,00	92.968.000,00	0,00	1.617.068.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	12.625.000,00	0,00	12.625.000,00	0,00	12.625.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.15.66	Monitoring, evaluasi dan laporan	36.640.500,00	0,00	36.370.500,00	0,00	36.370.500,00	99,26	270.000,00
1.01.1.01.01.01.15.68	Pembangunan gedung sekolah TK Pembina Bco	187.130.000,00	0,00	174.400.000,00	12.174.000,00	187.174.000,00	99,96	36.000,00
1.01.1.01.01.01.15.69	Pembangunan gedung sekolah TK tunas harapan Asemat	186.930.000,00	0,00	183.674.000,00	0,00	183.674.000,00	97,78	3.256.000,00
1.01.1.01.01.01.15.70	Rehabilitasi sedang/berat/lanjutan sekolah TK dan PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	8.738.333.170,00	0,00	4.245.651.100,00	4.174.499.610,00	8.520.158.710,00	97,60	218.184.460,00
1.01.1.01.01.01.16.131	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri	552.760.000,00	0,00	0,00	510.280.000,00	510.280.000,00	92,31	42.480.000,00
1.01.1.01.01.01.16.132	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Swasta	552.760.000,00	0,00	510.280.000,00	0,00	510.280.000,00	92,31	42.480.000,00
1.01.1.01.01.01.16.133	Pengadaan Media Pendidikan SD Negeri	331.658.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	96,49	11.658.000,00
1.01.1.01.01.01.16.134	Pengadaan Media Pendidikan SD Swasta	331.658.000,00	0,00	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00	96,79	10.658.000,00
1.01.1.01.01.01.16.135	Pengadaan Peralatan Pendidikan SD Negeri	221.104.000,00	0,00	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	98,50	3.104.000,00
1.01.1.01.01.01.16.136	Pengadaan Peralatan Pendidikan SD Swasta	221.104.000,00	0,00	218.000.000,00	0,00	218.000.000,00	98,50	3.104.000,00
1.01.1.01.01.01.16.137	Pengadaan Perengkapan Sekolah (SILPA)	389.030.000,00	0,00	0,00	388.000.000,00	388.000.000,00	99,80	1.030.000,00
1.01.1.01.01.01.16.138	Pembangunan gedung sekolah (SILPA DAM 2015)	58.270.740,00	0,00	58.270.740,00	0,00	58.270.740,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.01	Pembangunan gedung sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	400.000.000,00	0,00	0,00	399.798.000,00	399.798.000,00	99,94	202.000,00
1.01.1.01.01.01.16.19	Pengadaan mebelur sekolah	150.000.000,00	0,00	99.104.520,00	49.947.260,00	149.051.780,00	99,89	108.220,00
1.01.1.01.01.01.16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	915.030.000,00	0,00	474.464.000,00	293.078.300,00	667.542.300,00	94,21	47.487.700,00
1.01.1.01.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat/ bangunan sekolah	500.000.000,00	0,00	248.187.000,00	142.438.000,00	496.625.000,00	97,77	11.375.000,00
1.01.1.01.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	199.139.900,00	0,00	190.152.000,00	0,00	190.152.000,00	95,46	8.987.900,00
1.01.1.01.01.01.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	88.634.600,00	0,00	83.189.800,00	0,00	83.189.800,00	93,88	5.444.800,00
1.01.1.01.01.01.16.73	Penyediaan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	45.825.100,00	0,00	43.821.900,00	0,00	43.821.900,00	95,63	2.003.200,00
1.01.1.01.01.01.16.87	Rehabilitasi sedang/berat/ gedung SD, Rumah Dinas SD, Pengadaan Mebelur, Buku dan Alat Peraga SD	306.045.730,00	0,00	281.748.890,00	0,00	281.748.890,00	92,36	24.296.840,00
1.01.1.01.01.01.16.122	Pembangunan rumah dinas SD Negeri Inpres 10/73 Bco	190.240.000,00	0,00	0,00	190.700.000,00	190.700.000,00	99,96	46.000,00
1.01.1.01.01.01.16.123	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD Negeri Alude	200.165.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	99,90	165.000,00
1.01.1.01.01.01.16.124	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD Katolik St. Agustinus Luning	200.165.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	99,92	165.000,00
1.01.1.01.01.01.16.125	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD Kinren liwet Aio	200.165.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	99,94	165.000,00
1.01.1.01.01.01.16.126	Pembangunan gedung perpustakaan SD Kristen Tiwabetu	203.627.000,00	0,00	0,00	203.627.000,00	203.627.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.128	Pembangunan gedung perpustakaan SD Negeri Inpres Gemeh	203.627.000,00	0,00	0,00	203.627.000,00	203.627.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.129	Rehabilitasi sedang/berat/ ruang kelas SD Negeri	1.157.535.500,00	0,00	0,00	1.157.524.000,00	1.157.524.000,00	100,00	11.500,00
1.01.1.01.01.01.16.130	Rehabilitasi sedang/berat/ ruang kelas SD Swasta	1.119.352.600,00	0,00	1.114.947.300,00	0,00	1.114.947.300,00	99,62	4.405.300,00
1.01.1.01.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	4.762.638.100,00	0,00	983.107.000,00	3.782.140.500,00	4.695.247.500,00	98,59	67.390.600,00
1.01.1.01.01.01.17.01	Pembangunan gedung sekolah	199.794.500,00	0,00	194.139.000,00	0,00	194.139.000,00	97,17	5.655.500,00
1.01.1.01.01.01.17.03	Penambahan ruang kelas sekolah	200.000.000,00	0,00	0,00	180.405.000,00	180.405.000,00	90,20	19.595.000,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN

Halaman 2 dari 2

EDM INOTE 6 PRO DUAL CAMERA



Dikpora 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			PEGAWI	BARANG & JASA	MCGAL	TOTAL	
1.01.1.01.01.17.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	175.000.000,00	0,00	0,00	174.294.890,00	705.150,00	
1.01.1.01.01.17.44	Rehabilitasi/ redang/berat/ ruang kelas sekolah	200.000.000,00	0,00	195.791.000,00	0,00	4.209.000,00	
1.01.1.01.01.17.61	Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	162.520.050,00	0,00	157.002.850,00	0,00	4.517.200,00	
1.01.1.01.01.17.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	78.029.150,00	0,00	64.534.200,00	0,00	13.494.950,00	
1.01.1.01.01.17.73	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 1 Lobbo	399.480.000,00	0,00	395.325.000,00	395.325.000,00	4.155.000,00	
1.01.1.01.01.17.74	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 1 Beo	439.114.000,00	0,00	438.995.000,00	438.995.000,00	119.000,00	
1.01.1.01.01.17.75	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA Negeri 2 Melonguane	397.630.000,00	0,00	397.546.000,00	397.546.000,00	84.000,00	
1.01.1.01.01.17.76	Pembangunan gedung Aula SMA Negeri 1 Beo	931.496.000,00	0,00	931.372.000,00	931.372.000,00	124.000,00	
1.01.1.01.01.17.77	Perubahan ruang kelas SMA Negeri 1 Horonge	200.000.000,00	0,00	196.200.000,00	196.200.000,00	3.800.000,00	
1.01.1.01.01.17.78	Pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri 1 Moronge	134.342.700,00	0,00	134.342.700,00	134.342.700,00	0,00	
1.01.1.01.01.17.79	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (SILPA)	986.971.700,00	0,00	32.460.000,00	949.920.000,00	4.051.700,00	
1.01.1.01.01.17.80	Pembangunan gedung sekolah (SILPA DAK 2015)	258.390.000,00	0,00	258.390.000,00	258.390.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	166.416.550,00	0,00	159.392.965,00	0,00	7.023.585,00	
1.01.1.01.01.20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	36.294.500,00	0,00	36.072.630,00	0,00	221.870,00	
1.01.1.01.01.20.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.20.09	Pengembangan sistem prafidatan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	73.740.300,00	0,00	73.721.800,00	0,00	18.500,00	
1.01.1.01.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	56.281.750,00	0,00	49.398.535,00	0,00	6.883.215,00	
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	287.220.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	187.220.000,00	
1.01.1.01.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kolektif/organisasi di bidang pendidikan	287.220.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	187.220.000,00	
1.18.1.01.01.16	Program peningkatan peran serta kemandirian	224.747.700,00	3.950.000,00	224.044.700,00	0,00	703.000,00	
1.18.1.01.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	115.538.700,00	0,00	115.538.700,00	0,00	0,00	
1.18.1.01.01.16.04	Fasilitasi pekarer temu wicara organisasi pemuda	118.659.000,00	0,00	113.766.000,00	0,00	5.893.000,00	
JUMLAH		19.966.920.270,00	1.735.430.000,00	7.747.062.385,00	9.892.053.815,00	19.375.746.200,00	

Melonguane, 31 Desember 2016
Kepala Dinas

DR. IMEN D.J. MANAPODE,SPd,M.Pd
NIP. 196805081993031010

Halaman 2

REDMI NOTE 6 PRO



Lampiran 5. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2017

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MCDAL	TOTAL	
1.01	Urusan Pemerintahan	1.01					
1.01.01	Unit Organisasi	1.01.01					
1.01.01.01	Sub Unit Organisasi	1.01.01.01					
			Unsur Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan				
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
			Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.497.527.200,00	46.190.000,00	1.368.158.960,00	4.500.000,00	1.435.549.960,00	94,79
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	248.950.000,00	0,00	246.987.400,00	0,00	246.987.400,00	99,21
1.01.1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/perorangan	83.161.000,00	0,00	42.346.904,00	0,00	42.346.904,00	50,92
1.01.1.01.01.01.01.06	Penyediaan jasa kebersihan kantor	35.525.000,00	0,00	35.525.000,00	0,00	35.525.000,00	100,00
1.01.1.01.01.01.01.08	Penyediaan alat tulis kantor	77.527.100,00	0,00	77.497.363,00	0,00	77.497.363,00	99,96
1.01.1.01.01.01.01.10	Penyediaan barang estakan dan pengandaan	45.070.000,00	0,00	39.557.794,00	0,00	39.557.794,00	86,24
1.01.1.01.01.01.01.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.01.01.01.13	Penyediaan makanan dan minuman	104.375.000,00	0,00	102.947.069,00	0,00	102.947.069,00	98,63
1.01.1.01.01.01.01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	472.990.000,00	0,00	458.951.358,00	0,00	458.951.358,00	97,03
1.01.1.01.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	179.739.000,00	0,00	175.346.000,00	0,00	175.346.000,00	97,56
1.01.1.01.01.01.01.20	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	244.890.000,00	46.190.000,00	189.000.000,00	0,00	235.890.000,00	96,32
1.01.1.01.01.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.299.029.843,00	0,00	0,00	4.166.691.244,00	4.166.691.244,00	96,92
1.01.1.01.01.01.02	Pembangunan gedung kantor	604.950.000,00	0,00	0,00	593.368.000,00	593.368.000,00	98,09
1.01.1.01.01.01.02.01	Pengadaan peralatan gedung kantor	143.286.599,00	0,00	0,00	55.563.000,00	55.563.000,00	38,78
1.01.1.01.01.01.02.09	Rehabilitasi gedung/berat gedung kantor	141.108.744,00	0,00	0,00	138.075.744,00	138.075.744,00	97,85
1.01.1.01.01.01.02.42	Pembangunan gedung olah raga (Lanjutan)	3.409.694.500,00	0,00	0,00	3.379.684.500,00	3.379.684.500,00	99,12
1.01.1.01.01.01.02.52	Pembangunan gedung olah raga (Lanjutan)	336.120.700,00	0,00	330.453.000,00	0,00	330.453.000,00	98,31
1.01.1.01.01.01.11	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	336.120.700,00	0,00	330.453.000,00	0,00	330.453.000,00	98,31
1.01.1.01.01.01.11.01	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	336.120.700,00	0,00	330.453.000,00	0,00	330.453.000,00	98,31
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.803.538.400,00	381.000.000,00	1.418.288.354,00	0,00	1.799.288.354,00	99,76
1.01.1.01.01.01.15.01	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	64.031.300,00	0,00	63.987.679,00	0,00	63.987.679,00	99,93
1.01.1.01.01.01.15.57	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	1.739.507.100,00	381.000.000,00	1.354.100.675,00	0,00	1.735.300.675,00	99,76
1.01.1.01.01.01.15.59	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.966.679.763,00	0,00	2.955.091.300,00	9.128.815.741,00	12.083.907.041,00	55,01
1.01.1.01.01.01.16	Pembangunan gedung sekolah	328.787.130,00	0,00	70.732.000,00	269.911.545,00	340.643.545,00	103,61
1.01.1.01.01.01.16.01	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, kepala sekolah	179.000.000,00	0,00	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	100,00
1.01.1.01.01.01.16.02	Penambahan ruang kelas sekolah	753.520.000,00	0,00	245.140.000,00	507.580.000,00	753.520.000,00	100,00
1.01.1.01.01.01.16.03	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	99.510.000,00	0,00	96.550.000,00	96.550.000,00	96.550.000,00	97,03
1.01.1.01.01.01.16.07	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	50.000.000,00	0,00	47.527.000,00	47.527.000,00	47.527.000,00	95,05
1.01.1.01.01.01.16.10	Pembangunan perpustakaan sekolah	250.000.000,00	0,00	49.100.000,00	199.529.000,00	249.429.000,00	99,77
1.01.1.01.01.01.16.12	Pengadaan mebeliur sekolah	150.000.000,00	0,00	0,00	149.847.500,00	149.847.500,00	99,90
1.01.1.01.01.01.16.19	Pengadaan perlengkapan sekolah	150.000.000,00	0,00	0,00	149.847.500,00	149.847.500,00	99,90

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
1.01.1.01.01.16.94	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.63	Penyediaan Gantian Operasional Sekolah (BOS) Jaringan SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren, Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073.400.000,00
1.01.1.01.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa	190.333.600,00	0,00	149.445.500,00	0,00	149.445.500,00	99,38	938.100,00
1.01.1.01.01.01.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	160.037.800,00	0,00	159.743.400,00	0,00	159.743.400,00	99,81	310.400,00
1.01.1.01.01.01.16.73	Penyediaan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	129.353.500,00	0,00	103.480.000,00	0,00	103.480.000,00	79,99	25.883.500,00
1.01.1.01.01.01.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	231.593.500,00	0,00	231.344.000,00	0,00	231.344.000,00	99,89	749.500,00
1.01.1.01.01.01.16.87	Rehabilitasi sedang/berat gedung SD, Rumah Dinas SD, Pengadaan Mebelear, Buku dan Alat Peraga SD	90.000.000,00	0,00	0,00	49.885.000,00	49.885.000,00	99,77	115.000,00
1.01.1.01.01.01.16.90	Pembangunan Ruang Serbaguna SD dan SMP	1.113.569.617,00	0,00	0,00	1.099.646.000,00	1.099.646.000,00	98,82	15.323.617,00
1.01.1.01.01.01.16.101	Rehabilitasi Sdang/Berat Ruang kelas SD - SMP Negeri (Hutang Tahun 2015)	214.618.612,00	0,00	0,00	213.159.316,00	213.159.316,00	99,32	1.459.296,00
1.01.1.01.01.01.16.115	Pembangunan Ruangan Kelas Baru (RKB) SMP Berta Perabotnya	1.010.000.000,00	0,00	192.000.000,00	818.000.000,00	1.010.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.116	Pembangunan gedung laboratorium IPA, Komputer dan Bahasa SMP beserta Perabotnya	1.040.470.240,00	0,00	346.023.400,00	577.076.280,00	923.099.680,00	88,80	116.570.560,00
1.01.1.01.01.01.16.118	Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah menengah pertama (SMP)	2.688.000.000,00	0,00	0,00	2.688.000.000,00	2.688.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.129	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD Negeri	1.019.033.700,00	0,00	0,00	1.019.033.700,00	1.019.033.700,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.130	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas SD Swasta	838.000.000,00	0,00	838.000.000,00	0,00	838.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.131	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SD Negeri	318.333.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.333.576,00
1.01.1.01.01.01.16.137	Pembangunan Kantor/Ruang Guru SD	326.400.000,00	0,00	182.400.000,00	144.000.000,00	326.400.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.138	Rehabilitasi Kantor/Ruang Guru Beseata Perabotnya	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.139	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah SD Negeri dan SD Swasta	192.000.000,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	192.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.140	Pembangunan dan/atau rehabilitasi ruang guru/ kantor guru SMP	96.000.000,00	0,00	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.141	Penyediaan peralatan/media pendidikan dan/atau koleksi perpustakaan	332.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000.000,00
1.01.1.01.01.01.16.142	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Perjaga Sekolah SMP	590.272.400,00	0,00	0,00	590.272.400,00	590.272.400,00	100,00	88,00
1.01.1.01.01.01.16.143	Pembangunan Pagar Keliling Berupa Hutan Masak SD dan SMP	390.000.000,00	0,00	289.383.000,00	96.728.000,00	386.111.000,00	99,00	3.889.000,00
1.01.1.01.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.17.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.1.01.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	182.237.250,00	0,00	170.997.325,00	0,00	170.997.325,00	93,81	11.039.925,00
1.01.1.01.01.01.20.01	Peaksanaan Sertifikasi pendidik	93.560.000,00	0,00	91.360.621,00	0,00	91.360.621,00	97,65	2.199.379,00
1.01.1.01.01.01.20.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	19.079.000,00	0,00	14.198.740,00	0,00	14.198.740,00	74,46	4.871.260,00
1.01.1.01.01.01.20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	69.607.250,00	0,00	65.037.956,00	0,00	65.037.956,00	93,44	4.569.294,00
2.13.1.01.01.01.16	Program peningkatan peran serta masyarakat	417.095.000,00	0,00	416.412.000,00	0,00	416.412.000,00	99,84	683.000,00
2.13.1.01.01.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	320.303.000,00	0,00	319.635.000,00	0,00	319.635.000,00	99,79	668.000,00
2.13.1.01.01.01.16.04	Pekan temu wicara organisasi pemuda	96.792.000,00	0,00	96.777.000,00	0,00	96.777.000,00	99,98	15.000,00
JUMLAH		20.502.228.156,00	427.890.000,00	6.659.000.947,00	13.300.006.985,00	20.386.897.932,00	66,84	10.115.330.224,00

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEKRETTIF PER KEGIATAN

Kelamin 2 dari 3



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			PEGAJAWI	BARANG & JASA	MICAL	TOTAL	
Mekongkine, 31 Desember 2017							
Kepala Dinas							
Drs. Adrianon A. M. Taaraga							
NIP. 19670412 199512 1 003							
Halaman							

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PERIODE KEGIATAN

REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

Lampiran 6. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Pendidikan

Tahun 2018

PERMINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		
Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar: Pendidikan Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan, Keperawatan dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 Dinas Pendidikan, Keperawatan dan Olahraga								
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.324.544.050,00	26.790.000,00	1.248.830.572,00	0,00	1.275.620.572,00	96,31	48.923.478,00
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	65.400.000,00	0,00	60.044.500,00	0,00	60.044.500,00	91,81	5.355.500,00
1.01.1.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perincian kendaraan dinas/operasional	145.030.000,00	0,00	141.052.600,00	0,00	141.052.600,00	97,26	3.977.400,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa kebersihan kantor	43.624.000,00	0,00	40.304.000,00	0,00	40.304.000,00	92,39	3.320.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.600.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	96,88	300.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan alat tulis kantor	93.196.000,00	0,00	47.020.000,00	0,00	47.020.000,00	50,47	46.176.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	47.000.000,00	0,00	9.330.000,00	0,00	9.330.000,00	19,89	37.670.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.330.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	590,56	45.670.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000,00	0,00	286.908.972,00	0,00	286.908.972,00	518,18	231.901.000,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	293.347.450,00	0,00	213.995.000,00	0,00	213.995.000,00	72,96	79.352.450,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	214.146.400,00	0,00	213.995.000,00	0,00	213.995.000,00	99,93	151.600,00
1.01.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	349.290.000,00	26.790.000,00	292.700.000,00	0,00	319.290.000,00	91,41	30.000.000,00
1.01.1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.609.503.250,00	0,00	998.660.000,00	0,00	998.660.000,00	61,99	610.843.250,00
1.01.1.01.01.01.02.01	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/1 Tule (Hutang Tahun 2016)	9.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.485.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	7.122.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122.750,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01	Pembangunan gelanggang olah raga (Lampunan)	592.685.500,00	0,00	0,00	592.885.500,00	592.885.500,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Lapangan Bola Voli 7 (Tajak) Pakes	57.600.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	98,96	900.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Taduna	134.600.000,00	0,00	134.520.000,00	0,00	134.520.000,00	99,94	80.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Kabupaten Timur	134.600.000,00	0,00	134.500.000,00	0,00	134.500.000,00	99,93	100.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Batumbalango	134.600.000,00	0,00	134.540.000,00	0,00	134.540.000,00	99,96	60.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Peret	134.600.000,00	0,00	134.480.000,00	0,00	134.480.000,00	99,91	120.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Ambia	134.600.000,00	0,00	134.530.000,00	0,00	134.530.000,00	99,95	70.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Riang	134.600.000,00	0,00	134.510.000,00	0,00	134.510.000,00	99,93	90.000,00
1.01.1.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Lobbo	134.600.000,00	0,00	134.580.000,00	0,00	134.580.000,00	99,96	70.000,00
1.01.1.01.01.01.12	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	489.830.200,00	0,00	472.958.199,00	0,00	472.958.199,00	96,56	16.872.001,00
1.01.1.01.01.01.12.01	Peleaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	267.238.000,00	0,00	262.562.699,00	0,00	262.562.699,00	98,25	4.665.301,00
1.01.1.01.01.01.12.01.01	Pembinaan dan Pembinaan Olahraga Berbakat	222.492.200,00	0,00	210.395.500,00	0,00	210.395.500,00	94,52	12.096.700,00
1.01.1.01.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.281.146.675,00	0,00	1.129.597.263,00	0,00	1.129.597.263,00	88,14	151.549.412,00
1.01.1.01.01.01.15.63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	299.198.000,00	0,00	151.960.000,00	0,00	151.960.000,00	50,67	147.238.000,00
1.01.1.01.01.01.15.66	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	52.532.975,00	0,00	49.680.000,00	0,00	49.680.000,00	94,55	2.852.975,00

Halaman 1

REDIRECTOR MI DUAL CAMERA

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MOJAL	TOTAL		%
			0,00	33.453.381,90	0,00	33.453.381,90	96,46	1.242.319,00
			0,00	894.193.902,00	0,00	894.193.902,00	100,00	6.098,00
1.01.1.01.01.01.15.57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	35.095.700,00						
1.01.1.01.01.01.15.59	Penyenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	894.200.000,00						
1.01.1.01.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	21.526.294.552,00	0,00	4.149.416.844,00	7.754.546.732,00	11.903.963.576,00	55,30	9.422.330.676,00
1.01.1.01.01.01.16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, tenaga sekolah	449.274.000,00	0,00	298.364.768,00	150.909.232,00	449.274.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	544.688.000,00	0,00	272.334.000,00	272.334.000,00	544.688.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	1.019.454.000,00	0,00	0,00	1.019.454.000,00	1.019.454.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	127.216.000,00	0,00	0,00	127.216.000,00	127.216.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.19	Pengadaan meubelur sekolah	150.000.000,00	0,00	49.885.000,00	99.770.000,00	149.855.000,00	99,77	345.000,00
1.01.1.01.01.01.16.23	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	125.000.000,00	0,00	114.750.000,00	0,00	114.750.000,00	91,80	10.250.000,00
1.01.1.01.01.01.16.41	Rehabilitasi gedung/beral bangunan sekolah TK/Kitabisa Santa Teresia Mangaran	100.000.000,00	0,00	37.350.000,00	0,00	37.350.000,00	37,35	62.650.000,00
1.01.1.01.01.01.16.63	Penyediaan Tamban Operasional Sekolah (BOG) tentang SD/MI/SOKB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-lam Setara SD dan SMP	9.073.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073.400.000,00
1.01.1.01.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	331.719.400,00	0,00	268.959.400,00	0,00	268.959.400,00	80,99	64.760.000,00
1.01.1.01.01.01.16.72	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	577.931.650,00	0,00	532.203.376,00	0,00	532.203.376,00	92,09	45.728.274,00
1.01.1.01.01.01.16.73	Penyediaan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	66.431.152,00	0,00	66.179.000,00	0,00	66.179.000,00	99,62	252.152,00
1.01.1.01.01.01.16.78	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	114.022.350,00	0,00	107.085.500,00	0,00	107.085.500,00	93,92	6.936.850,00
1.01.1.01.01.01.16.118	Pembangunan gedung laboratorium IPA, Komputer dan Bahasa SMP beserta Pesibiotya	703.840.000,00	0,00	0,00	703.840.000,00	703.840.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.118	Rehabilitasi gedung/beral gedung sekolah menengah pertama (SMP)	2.320.636.000,00	0,00	0,00	2.320.636.000,00	2.320.636.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.129	Rehabilitasi gedung/beral ruang kelas SD Negeri	1.540.319.000,00	0,00	0,00	1.540.319.000,00	1.540.319.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.130	Rehabilitasi gedung/beral ruang kelas SD Swasta	1.777.981.000,00	0,00	1.777.981.000,00	0,00	1.777.981.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.130	Rehabilitasi gedung/beral ruang kelas SMPN V Lurung	50.000.000,00	0,00	49.740.000,00	0,00	49.740.000,00	99,48	260.000,00
1.01.1.01.01.01.16.144	Rehabilitasi Jaringan Instalasi Listrik SMPN V Lurung	225.000.000,00	0,00	0,00	214.600.000,00	214.600.000,00	95,38	10.400.000,00
1.01.1.01.01.01.16.147	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Melonguane Timur	100.000.000,00	0,00	0,00	89.800.000,00	89.800.000,00	89,80	10.200.000,00
1.01.1.01.01.01.16.140	Rehabilitasi gedung/beral Rumah Dinas Kepala Sekolah, Rumah Dinas Guru SDN Inpres Bovermiliari	100.000.000,00	0,00	89.075.000,00	0,00	89.075.000,00	89,88	10.925.000,00
1.01.1.01.01.01.16.149	Rehabilitasi gedung/beral bangunan sekolah SD Kristen Klama	475.696.000,00	0,00	348.349.800,00	0,00	348.349.800,00	73,20	127.346.200,00
1.01.1.01.01.01.16.150	Kegiatan Perunggan DAK	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.01.16.151	Pengadaan Media Pembelajaran	520.396.000,00	0,00	0,00	520.158.500,00	520.158.500,00	99,95	237.500,00
1.01.1.01.01.01.16.152	Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru	157.000.000,00	0,00	0,00	141.800.000,00	141.800.000,00	90,32	15.200.000,00
1.01.1.01.01.01.16.153	Rehabilitasi Ruang Belajar SDN Ruang	174.090.000,00	0,00	0,00	158.700.000,00	158.700.000,00	91,16	15.390.000,00
1.01.1.01.01.01.16.154	Rehabilitasi SDN Inp 3/77 Beo	117.000.000,00	0,00	0,00	101.750.000,00	101.750.000,00	86,97	15.250.000,00
1.01.1.01.01.01.16.158	Rehabilitasi SDN Inp Kaleruan	150.000.000,00	0,00	0,00	129.700.000,00	129.700.000,00	86,47	20.300.000,00
1.01.1.01.01.01.16.160	Pembangunan Pagar Keliling SDN Alude	157.000.000,00	0,00	141.750.000,00	0,00	141.750.000,00	90,29	15.250.000,00
1.01.1.01.01.01.16.161	Rehabilitasi SDK Kahari Dapalan	147.000.000,00	0,00	44.350.000,00	0,00	44.350.000,00	30,17	102.650.000,00
1.01.1.01.01.01.16.162	Pembangunan Jamban Siswa SDK Immanuel Klama	90.700.000,00	0,00	0,00	75.500.000,00	75.500.000,00	83,24	15.200.000,00
1.01.1.01.01.01.16.163	Rehabilitasi SDN Inpres Pulutan	418.830.592,00	0,00	418.488.829,00	0,00	418.488.829,00	99,92	341.763,00
1.01.1.01.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	284.038.492,00	0,00	284.010.937,00	0,00	284.010.937,00	99,99	27.555,00
1.01.1.01.01.01.20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	23.526.400,00	0,00	23.515.192,00	0,00	23.515.192,00	99,95	11.208,00
1.01.1.01.01.01.20.06	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dari pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan							

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DESINTIP PER KEKANTONAN

Halaman 2 dari 3

REDMI NOTE 6 PRO





KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			TOTAL	%	SISA ANGGARAN
			PEGAJAI	BARANG & JASA	MCDAL			
		99.655.700,00	0,00	99.362.700,00	0,00	99.362.700,00	99,70	303.000,00
1.01.1.01.01.20.09	Pengembangan sistem pendidikan dan pemetaan jenjang dan tenaga kependidikan	11.406.000,00	0,00	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00	100,00	0,00
1.01.1.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	453.641.500,00	0,00	446.215.191,00	0,00	446.215.191,00	98,32	7.426.309,00
2.13.1.01.01.01.18	Program peningkatan peran serta mahasiswa	346.542.000,00	0,00	360.145.791,00	0,00	360.145.791,00	98,31	6.156.209,00
2.13.1.01.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	87.239.500,00	0,00	85.869.400,00	0,00	85.869.400,00	98,36	1.430.100,00
2.13.1.01.01.16.04	Pekan temu wicara organisasi pemuda	48.490.000,00	0,00	48.490.000,00	0,00	48.490.000,00	100,00	0,00
2.13.1.01.01.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	48.490.000,00	0,00	48.490.000,00	0,00	48.490.000,00	100,00	0,00
2.13.1.01.01.19.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	48.490.000,00	0,00	48.490.000,00	0,00	48.490.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	27.152.689.819,00	26.790.000,00	8.912.656.918,00	8.347.432.232,00	17.286.879.150,00	63,66	9.866.051.669,00

Melonggane, 31 Desember 2018
Kepala Dinas

Dr. Adrianon A. M. Taarega
NIP. 19670412 199512 1 003

Halaman 3 dari 3



Lampiran 7. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016

Urusan Pemerintahan : 1.13 Urusan Wajib Sosial
Unit Organisasi : 1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 1.13 . 1.13.01 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	4.381.270.582,00	0,00	4.288.290.609,00	4.288.290.609,00	(92.979.973,00)
5.1	BELANJA OPERASI	4.332.156.982,00	0,00	4.239.384.859,00	4.239.384.859,00	(92.772.123,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	2.273.929.582,00	0,00	2.257.615.612,00	2.257.615.612,00	(16.313.970,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.917.144.734,00	0,00	1.914.644.734,00	1.914.644.734,00	(2.500.000,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.440.510.180,00	0,00	1.438.510.180,00	1.438.510.180,00	(2.000.000,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga	117.694.787,00	0,00	117.194.787,00	117.194.787,00	(500.000,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan	182.865.000,00	0,00	182.865.000,00	182.865.000,00	0,00
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum	37.160.000,00	0,00	37.160.000,00	37.160.000,00	0,00
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Beras	82.922.934,00	0,00	82.922.934,00	82.922.934,00	0,00
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	9.842.413,00	0,00	9.842.413,00	9.842.413,00	0,00
5.1.1.01.08	Belanja Pembulatan Gaji	19.827,00	0,00	19.827,00	19.827,00	0,00
5.1.1.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	40.104.858,00	0,00	40.104.858,00	40.104.858,00	0,00
5.1.1.01.22	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.677.631,00	0,00	2.677.631,00	2.677.631,00	0,00
5.1.1.01.23	Belanja Iuran Jaminan Kematian	3.347.104,00	0,00	3.347.104,00	3.347.104,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	356.784.848,00	0,00	342.970.878,00	342.970.878,00	(13.813.970,00)
5.1.1.02.02	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	356.784.848,00	0,00	342.970.878,00	342.970.878,00	(13.813.970,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.058.227.400,00	0,00	1.981.769.247,00	1.981.769.247,00	(76.458.153,00)
5.1.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.754.590,00	0,00	64.012.842,00	64.012.842,00	(741.748,00)
5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.284.090,00	0,00	50.988.842,00	50.988.842,00	(295.248,00)
5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.080.000,00	0,00	4.001.200,00	4.001.200,00	(78.800,00)
5.1.2.01.04	Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6.390.500,00	0,00	6.022.800,00	6.022.800,00	(367.700,00)
5.1.2.02	Belanja Bahan/Material	33.922.612,00	0,00	33.904.313,00	33.904.313,00	(18.299,00)
5.1.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.517.500,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	(17.500,00)
5.1.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	13.405.112,00	0,00	13.404.313,00	13.404.313,00	(799,00)
5.1.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.600.000,00	0,00	45.198.505,00	45.198.505,00	(22.401.495,00)
5.1.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	0,00	1.800.005,00	1.800.005,00	(599.995,00)
5.1.2.03.03	Belanja Listrik	1.800.000,00	0,00	998.500,00	998.500,00	(801.500,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 3

Printed by Sudi

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.12	Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	63.400.000,00	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	(21.000.000,00)
5.1.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.811.000,00	0,00	34.503.275,00	34.503.275,00	(2.307.725,00)
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	0,00	8.531.100,00	8.531.100,00	(1.968.900,00)
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.411.000,00	0,00	12.396.175,00	12.396.175,00	(14.825,00)
5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.900.000,00	0,00	12.893.000,00	12.893.000,00	(7.000,00)
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	683.000,00	683.000,00	(317.000,00)
5.1.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.817.000,00	0,00	20.133.800,00	20.133.800,00	(683.200,00)
5.1.2.06.01	Belanja Cetak	7.654.000,00	0,00	7.093.800,00	7.093.800,00	(560.200,00)
5.1.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.163.000,00	0,00	13.040.000,00	13.040.000,00	(123.000,00)
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.1.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)
5.1.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	(500.000,00)
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	71.058.000,00	0,00	59.288.320,00	59.288.320,00	(11.769.680,00)
5.1.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	53.058.000,00	0,00	51.868.320,00	51.868.320,00	(1.189.680,00)
5.1.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	18.000.000,00	0,00	7.420.000,00	7.420.000,00	(10.580.000,00)
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
5.1.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	684.169.200,00	0,00	670.439.202,00	670.439.202,00	(13.729.998,00)
5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	263.756.000,00	0,00	262.482.250,00	262.482.250,00	(1.273.750,00)
5.1.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	420.413.200,00	0,00	407.956.952,00	407.956.952,00	(12.456.248,00)
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.18.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	921.500.000,00	0,00	910.388.990,00	910.388.990,00	(11.111.010,00)
5.1.2.20.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	921.500.000,00	0,00	910.388.990,00	910.388.990,00	(11.111.010,00)
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	43.194.998,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	(11.694.998,00)
5.1.2.23.03	Belanja Bimbingan Teknis	43.194.998,00	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	(11.694.998,00)
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS	66.000.000,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	(1.500.000,00)
5.1.2.26.02	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	66.000.000,00	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	(1.500.000,00)
5.2	BELANJA MODAL	49.113.600,00	0,00	48.905.750,00	48.905.750,00	(207.850,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.113.600,00	0,00	48.905.750,00	48.905.750,00	(207.850,00)
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.413.600,00	0,00	22.233.750,00	22.233.750,00	(179.850,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 3

Printed By: Sudi



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.16.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.639.600,00	0,00	15.500.100,00	15.500.100,00	(139.500,00)
5.2.2.16.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.774.000,00	0,00	6.733.650,00	6.733.650,00	(40.350,00)
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	26.700.000,00	0,00	26.672.000,00	26.672.000,00	(28.000,00)
5.2.2.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00	20.600.000,00	0,00
5.2.2.17.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	6.100.000,00	0,00	6.072.000,00	6.072.000,00	(28.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(4.381.270.582,00)	0,00	(4.288.290.609,00)	(4.288.290.609,00)	92.979.973,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(4.381.270.582,00)	0,00	(4.288.290.609,00)	(4.288.290.609,00)	92.979.973,00

Lampiran 8. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2017



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan	: 1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Unit Organisasi	: 1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi	: 1.06 . 1.06.01 . 01	Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	8.650.346.953,00	0,00	8.305.945.924,00	8.305.945.924,00	(344.401.029,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.772.268.953,00	0,00	1.770.653.329,00	1.770.653.329,00	(1.615.624,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.772.268.953,00	0,00	1.770.653.329,00	1.770.653.329,00	(1.615.624,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.532.752.078,00	0,00	1.532.652.078,00	1.532.652.078,00	(100.000,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.145.860.700,00	0,00	1.145.860.700,00	1.145.860.700,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	98.823.370,00	0,00	98.723.370,00	98.723.370,00	(100.000,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	152.745.000,00	0,00	152.745.000,00	152.745.000,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	27.090.000,00	0,00	27.090.000,00	27.090.000,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	66.988.500,00	0,00	66.988.500,00	66.988.500,00	0,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.716.168,00	0,00	3.716.168,00	3.716.168,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.905,00	0,00	14.905,00	14.905,00	0,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	32.208.072,00	0,00	32.208.072,00	32.208.072,00	0,00
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.357.915,00	0,00	2.357.915,00	2.357.915,00	0,00
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian	2.947.448,00	0,00	2.947.448,00	2.947.448,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	239.516.875,00	0,00	238.001.251,00	238.001.251,00	(1.515.624,00)
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	239.516.875,00	0,00	238.001.251,00	238.001.251,00	(1.515.624,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.878.078.000,00	0,00	6.535.292.595,00	6.535.292.595,00	(342.785.405,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	103.990.000,00	0,00	103.990.000,00	103.990.000,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	22.690.000,00	0,00	22.690.000,00	22.690.000,00	0,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.290.000,00	0,00	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00	81.300.000,00	0,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	81.300.000,00	0,00	81.300.000,00	81.300.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.774.088.000,00	0,00	6.431.302.595,00	6.431.302.595,00	(342.785.405,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.661.000,00	0,00	39.376.846,00	39.376.846,00	(25.284.154,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.973.000,00	0,00	33.035.846,00	33.035.846,00	(19.937.154,00)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.560.000,00	0,00	2.555.000,00	2.555.000,00	(5.000,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.128.000,00	0,00	3.786.000,00	3.786.000,00	(5.342.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Printed by Swwid

Halaman 1 dari 2



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	152.700.000,00	0,00	140.922.750,00	140.922.750,00	(11.777.250,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air	2.400.000,00	0,00	828.250,00	828.250,00	(1.571.750,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	0,00	1.494.500,00	1.494.500,00	(1.505.500,00)
5.2.2.03.12	Jasa narasumber/tenaga ahli	15.300.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(8.700.000,00)
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas	132.000.000,00	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	39.377.000,00	0,00	36.154.655,00	36.154.655,00	(3.222.345,00)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	0,00	5.992.000,00	5.992.000,00	(8.000,00)
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.012.000,00	0,00	9.002.655,00	9.002.655,00	(9.345,00)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.560.000,00	0,00	21.160.000,00	21.160.000,00	(400.000,00)
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.805.000,00)
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.842.000,00	0,00	8.261.260,00	8.261.260,00	(4.580.740,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.873.000,00	0,00	1.433.000,00	1.433.000,00	(440.000,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.969.000,00	0,00	6.828.260,00	6.828.260,00	(4.140.740,00)
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.500.000,00	0,00	8.067.450,00	8.067.450,00	(16.432.550,00)
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	(5.400.000,00)
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	18.000.000,00	0,00	6.967.450,00	6.967.450,00	(11.032.550,00)
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	89.679.000,00	0,00	70.820.600,00	70.820.600,00	(18.858.400,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43.975.000,00	0,00	25.145.600,00	25.145.600,00	(18.829.400,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	45.704.000,00	0,00	45.675.000,00	45.675.000,00	(29.000,00)
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	895.625.400,00	0,00	658.994.034,00	658.994.034,00	(236.631.366,00)
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	525.448.000,00	0,00	373.440.200,00	373.440.200,00	(152.007.800,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	370.177.400,00	0,00	285.553.834,00	285.553.834,00	(84.623.566,00)
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.493.203.600,00	0,00	5.467.205.000,00	5.467.205.000,00	(25.998.600,00)
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.493.203.600,00	0,00	5.467.205.000,00	5.467.205.000,00	(25.998.600,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(8.650.346.953,00)	0,00	(8.305.945.924,00)	(8.305.945.924,00)	344.401.029,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.650.346.953,00)	0,00	(8.305.945.924,00)	(8.305.945.924,00)	344.401.029,00

APORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 2

2024-03-20 10:00

Lampiran 9. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Tahun 2018



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Unit Organisasi : 1.06.1.06.01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.1.06.01.01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA	8.844.655.448,00	0,00	8.699.940.512,00	8.699.940.512,00	(144.714.936,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.944.586.348,00	0,00	1.943.512.164,00	1.943.512.164,00	(1.074.184,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	1.944.586.348,00	0,00	1.943.512.164,00	1.943.512.164,00	(1.074.184,00)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.479.508.226,00	0,00	1.478.435.292,00	1.478.435.292,00	(1.072.934,00)
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.086.820.200,00	0,00	1.086.820.200,00	1.086.820.200,00	0,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	105.313.728,00	0,00	104.538.864,00	104.538.864,00	(774.864,00)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	156.165.000,00	0,00	156.165.000,00	156.165.000,00	0,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.265.000,00	0,00	26.265.000,00	26.265.000,00	0,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	64.236.540,00	0,00	63.946.860,00	63.946.860,00	(289.680,00)
5.1.1.01.07	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1.772.027,00	0,00	1.772.027,00	1.772.027,00	0,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	20.667,00	0,00	20.525,00	20.525,00	(142,00)
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.402.313,00	0,00	30.394.065,00	30.394.065,00	(8.248,00)
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.216.246,00	0,00	2.216.246,00	2.216.246,00	0,00
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian	6.296.505,00	0,00	6.296.505,00	6.296.505,00	0,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	465.078.122,00	0,00	465.076.872,00	465.076.872,00	(1.250,00)
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	465.078.122,00	0,00	465.076.872,00	465.076.872,00	(1.250,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	6.900.069.100,00	0,00	6.756.428.348,00	6.756.428.348,00	(143.640.752,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.889.709.100,00	0,00	6.746.068.348,00	6.746.068.348,00	(143.640.752,00)
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.095.900,00	0,00	21.934.400,00	21.934.400,00	(161.500,00)
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.232.400,00	0,00	20.087.400,00	20.087.400,00	(145.000,00)
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	894.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	(14.000,00)
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	969.500,00	0,00	967.000,00	967.000,00	(2.500,00)
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	330.000.000,00	0,00	315.541.743,00	315.541.743,00	(14.458.257,00)
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.800.000,00	0,00	783.500,00	783.500,00	(1.016.500,00)
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.000.000,00	0,00	1.598.000,00	1.598.000,00	(1.402.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

Printed By: Sunardi



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
5.2.2.03.12	Jasa narasumber/tenaga ahli	121.200.000,00	0,00	121.200.000,00	121.200.000,00	0,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Tenaga Harian Lepas	144.000.000,00	0,00	131.960.243,00	131.960.243,00	(12.039.757,00)
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.900.000,00	0,00	19.055.000,00	19.055.000,00	(845.000,00)
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	0,00	7.925.000,00	7.925.000,00	(75.000,00)
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.300.000,00	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	(770.000,00)
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.583.200,00	0,00	11.513.400,00	11.513.400,00	(69.800,00)
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	0,00	1.047.000,00	1.047.000,00	(3.000,00)
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.533.200,00	0,00	10.466.400,00	10.466.400,00	(66.800,00)
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	0,00	49.905.000,00	49.905.000,00	(95.000,00)
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	0,00	24.905.000,00	24.905.000,00	(95.000,00)
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	437.130.000,00	0,00	381.518.805,00	381.518.805,00	(55.611.195,00)
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.535.000,00	0,00	129.930.000,00	129.930.000,00	(55.605.000,00)
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.595.000,00	0,00	251.588.805,00	251.588.805,00	(6.195,00)
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.964.000.000,00	0,00	5.891.600.000,00	5.891.600.000,00	(72.400.000,00)
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	5.964.000.000,00	0,00	5.891.600.000,00	5.891.600.000,00	(72.400.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(8.844.655.448,00)	0,00	(8.699.940.512,00)	(8.699.940.512,00)	144.714.936,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.844.655.448,00)	0,00	(8.699.940.512,00)	(8.699.940.512,00)	144.714.936,00

Lampiran 10. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2016

PEREMINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2016

URUSAN PEMERINTAHAN Unit Organisasi Sub Unit Organisasi	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAJAI	BARANG & JASA	MCDAL	TOTAL		
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	465.990.500,00	64.500.000,00	382.761.443,00	0,00	447.261.443,00	96,98	18.029.057,00
1.13.1.13.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00	0,00
1.13.1.13.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.200.000,00	0,00	2.798.505,00	0,00	2.798.505,00	66,63	1.401.495,00
1.13.1.13.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan peronian kendaraan dinas/operasional	54.811.000,00	18.000.000,00	34.503.275,00	0,00	52.503.275,00	95,79	1.307.725,00
1.13.1.13.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24.299.500,00	18.000.000,00	6.022.800,00	0,00	24.022.800,00	98,49	367.700,00
1.13.1.13.01.01.01.09	Penyediaan alat tulis kantor	0,00	0,00	36.135.617,00	0,00	36.135.617,00	99,30	757.383,00
1.13.1.13.01.01.01.11	Penyediaan barang cetak dan pengandaan	36.992.000,00	0,00	14.162.000,00	0,00	14.162.000,00	38,31	22.830.000,00
1.13.1.13.01.01.01.10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.400.000,00	0,00	4.001.200,00	0,00	4.001.200,00	27,78	10.398.800,00
1.13.1.13.01.01.01.11	Penyediaan alat tulis kantor	4.030.000,00	0,00	36.079.880,00	0,00	36.079.880,00	75,42	11.760.120,00
1.13.1.13.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	47.840.000,00	0,00	245.958.166,00	0,00	245.958.166,00	99,83	417.054,00
1.13.1.13.01.01.01.18	Penyediaan makanan dan minuman	246.276.000,00	0,00	245.958.166,00	0,00	245.958.166,00	95,00	1.300.000,00
1.13.1.13.01.01.01.17	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	30.000.000,00	28.100.000,00	1.600,00	0,00	28.101.600,00	93,66	1.198.400,00
1.13.1.13.01.01.01.21	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	69.631.100,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	29,44	49.131.100,00
1.13.1.13.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.413.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413.600,00
1.13.1.13.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	26.700.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	76,78	6.200.000,00
1.13.1.13.01.01.02.10	Pengadaan meubelur	20.517.500,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	116,45	2.882.500,00
1.13.1.13.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	0,00	23.400.000,00	100,00	0,00
1.13.1.13.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	23.400.000,00	0,00	89.815.986,00	0,00	89.815.986,00	383,83	66.415.986,00
1.13.1.13.01.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	113.544.998,00	0,00	89.815.986,00	0,00	89.815.986,00	78,71	23.729.012,00
1.13.1.13.01.01.03.05.03	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	113.544.998,00	0,00	89.815.986,00	0,00	89.815.986,00	78,71	23.729.012,00
1.13.1.13.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	113.544.998,00	0,00	951.073.690,00	0,00	951.073.690,00	837,91	837.528.692,00
1.13.1.13.01.01.05.03	Seminar teknis implementasi peraturan perundang-undangan	984.032.996,00	0,00	951.073.690,00	0,00	951.073.690,00	96,66	33.459.306,00
1.13.1.13.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	329.853.000,00	0,00	208.453.500,00	0,00	208.453.500,00	63,20	121.399.500,00
1.13.1.13.01.01.15.03	Lainnya	654.179.996,00	0,00	643.520.190,00	0,00	643.520.190,00	98,37	10.659.806,00
1.13.1.13.01.01.15.03.01	Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	276.773.800,00	0,00	276.538.350,00	0,00	276.538.350,00	99,93	235.461,70
1.13.1.13.01.01.15.03.02	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial terhadap PMKS yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH)	36.915.000,00	0,00	36.779.400,00	0,00	36.779.400,00	99,37	135.600,00
1.13.1.13.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	239.838.800,00	0,00	239.758.950,00	0,00	239.758.950,00	99,97	79.850,00
1.13.1.13.01.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	40.807.000,00	0,00	40.807.000,00	0,00	40.807.000,00	100,00	0,00
1.13.1.13.01.01.16.12	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.1.13.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REDMI NOTE 6 PRO

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		
			0,00	40.107.000,00	0,00	40.107.000,00	100,00	0,00
1.13.1.13.01.01.21.03	Peningkatan kualitas SDH kesehatan sosial masyarakat	40.107.000,00	0,00	55.913.678,00	0,00	55.913.678,00	99,11	301.434,00
1.14.1.13.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	56.415.112,00	0,00	55.913.678,00	0,00	55.913.678,00	99,11	301.434,00
1.14.1.13.01.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	25.305.000,00	0,00	24.370.600,00	0,00	24.370.600,00	96,31	194.400,00
1.14.1.13.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	25.305.000,00	0,00	24.370.600,00	0,00	24.370.600,00	96,31	194.400,00
1.14.1.13.01.01.17.05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	51.840.494,00	0,00	51.188.500,00	0,00	51.188.500,00	98,74	101.994,00
2.08.1.13.01.01.16	Program Transmigrasi lokal	51.840.494,00	0,00	51.188.500,00	0,00	51.188.500,00	98,74	101.994,00
2.08.1.13.01.01.16.03	Penyusunan Database warga Transmigrasi	51.840.494,00	0,00	51.188.500,00	0,00	51.188.500,00	98,74	101.994,00
JUMLAH		2.107.341.000,00	64.500.000,00	1.917.269.247,00	48.965.750,00	2.030.674.997,00	96,36	79.166.003,00

Melongkang, 21 Desember 2016
Kepala Dinas

Dr. IVONE S. M. KAPCJOS, ME
NIP. 196307251983012015



Lampiran 11. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2017

URaian Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL		
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	528.934.400,00	0,00	809.552.011,00	0,00	909.252.011,00	96,28	19.882.389,00
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.400.000,00	0,00	2.322.750,00	0,00	2.322.750,00	43,01	3.077.250,00
1.06.1.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	39.277.000,00	0,00	36.154.655,00	0,00	36.154.655,00	91,82	3.122.345,00
1.06.1.06.01.01.01.03	Penyediaan jasa kebersihan kantor	42.128.000,00	0,00	36.796.000,00	0,00	36.796.000,00	87,32	5.332.000,00
1.06.1.06.01.01.01.04	Penyediaan alat tulis kantor	31.590.000,00	0,00	24.088.846,00	0,00	24.088.846,00	77,61	6.951.154,00
1.06.1.06.01.01.01.05	Penyediaan barang cetak dan pengandaian	5.900.000,00	0,00	5.489.760,00	0,00	5.489.760,00	93,04	440.240,00
1.06.1.06.01.01.01.06	Penyediaan korporasi imbalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.560.000,00	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	99,98	500,00
1.06.1.06.01.01.01.07	Penyediaan makanan dan minuman	67.144.000,00	0,00	66.930.600,00	0,00	66.930.600,00	99,86	213.400,00
1.06.1.06.01.01.01.08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	236.375.400,00	0,00	235.944.400,00	0,00	235.944.400,00	99,82	431.000,00
1.06.1.06.01.01.01.09	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	0,00	99.000.000,00	100,00	0,00
1.06.1.06.01.01.15	Program Pemberdayaan Paksi Miskin, Komunitas Adat Terpencil (DAT) dan Puyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5.609.443.600,00	8.190.000,00	5.504.199.500,00	0,00	5.512.449.500,00	98,27	96.994.100,00
1.06.1.06.01.01.15.03	Manajemen usaha bagi keluarga miskin	368.630.000,00	3.560.000,00	299.905.000,00	0,00	303.465.000,00	83,30	65.165.000,00
1.06.1.06.01.01.15.06	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial terhadap PMKS yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH)	5.140.813.600,00	4.730.000,00	5.135.045.500,00	0,00	5.140.575.500,00	100,00	238.100,00
1.06.1.06.01.01.15.09	Penyusunan data dan Analisis Permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100.000.000,00	0,00	68.709.000,00	0,00	68.709.000,00	68,71	31.291.000,00
1.06.1.06.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	639.700.000,00	0,00	414.172.084,00	0,00	414.172.084,00	64,74	225.527.916,00
1.06.1.06.01.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	328.100.000,00	0,00	320.932.200,00	0,00	320.932.200,00	97,85	8.267.800,00
1.06.1.06.01.01.16.10	Perencanaan masalah-masalah strategis yang memerlukan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	75.000.000,00	0,00	31.889.950,00	0,00	31.889.950,00	42,52	43.110.050,00
1.06.1.06.01.01.16.12	Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial lanjut usia	200.700.000,00	0,00	25.713.934,00	0,00	25.713.934,00	12,81	174.986.066,00
1.06.1.06.01.01.16.14	Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial lanjut usia	35.000.000,00	0,00	34.636.000,00	0,00	34.636.000,00	99,06	364.000,00
1.06.1.06.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100.000.000,00	95.700.000,00	3.719.000,00	0,00	99.419.000,00	99,42	581.000,00
1.06.1.06.01.01.21.05	Pendampingan Program Keluarga Harapan	100.000.000,00	95.700.000,00	3.719.000,00	0,00	99.419.000,00	99,42	581.000,00
JUMLAH		6.878.078.000,00	103.990.000,00	6.431.302.595,00	0,00	6.535.292.595,00	95,02	342.785.405,00

Halaman 1 dari 2



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	
Malonggane, 31 Desember 2017 Kepala Dinas							
Dr. I. Dj. Manapode,SPd, MPd NIP. 196816011993011010							
Halaman 2 dari 2							



Lampiran 12. Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018

PEREMINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEFINITIF PER KEGIATAN
per 31 Desember 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			TOTAL	%	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL			
Urusan Pemerintahan : 1.06	Urusan (Wajib) Pelayanan Dasar Sosial							
Unit Organisasi : 1.06.01	Dinas Sosial							
Sub Unit Organisasi : 1.06.01.01	Dinas Sosial							
1.06.1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399.521.600,00	0,00	383.910.048,00	0,00	383.910.048,00	96,09	15.611.552,00
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.800.000,00	0,00	2.381.500,00	0,00	2.381.500,00	49,61	2.418.500,00
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinan kendaraan dinas/operasional	19.900.000,00	0,00	19.055.000,00	0,00	19.055.000,00	95,75	945.000,00
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.999.500,00	0,00	36.423.572,00	0,00	36.423.572,00	98,52	575.928,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	12.396.200,00	0,00	12.394.400,00	0,00	12.394.400,00	99,99	1.800,00
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.316.900,00	0,00	7.317.100,00	0,00	7.317.100,00	99,87	9.800,00
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan lemponan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	894.000,00	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00	98,43	114.000,00
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	0,00	29.995.000,00	0,00	29.995.000,00	99,98	5.000,00
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	159.000.000,00	0,00	158.999.805,00	0,00	158.999.805,00	99,94	100.195,00
1.06.1.06.01.01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	20.135.000,00	0,00	19.960.000,00	0,00	19.960.000,00	99,13	175.000,00
1.06.1.06.01.01.21	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	108.000.000,00	0,00	96.503.671,00	0,00	96.503.671,00	89,36	11.496.329,00
1.06.1.06.01.01.21.05	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	6.168.500.000,00	10.360.000,00	6.030.210.000,00	0,00	6.040.570.000,00	97,93	127.930.000,00
1.06.1.06.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	6.168.500.000,00	10.360.000,00	6.030.210.000,00	0,00	6.040.570.000,00	97,93	127.930.000,00
1.06.1.06.01.01.15.08	Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial terhadap PMKS yang memiliki rumah tidak layak huni (RTLH)	177.495.000,00	0,00	177.494.300,00	0,00	177.494.300,00	100,00	700,00
1.06.1.06.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	177.495.000,00	0,00	177.494.300,00	0,00	177.494.300,00	100,00	700,00
1.06.1.06.01.01.16.10	Penanganan masalah-masalah stratisys yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	154.552.500,00	0,00	154.454.000,00	0,00	154.454.000,00	99,94	98.500,00
1.06.1.06.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	154.552.500,00	0,00	154.454.000,00	0,00	154.454.000,00	99,94	98.500,00
1.06.1.06.01.01.21.05	Pendampingan Program Keluarga Harapan	154.552.500,00	0,00	154.454.000,00	0,00	154.454.000,00	99,94	98.500,00
JUMLAH		6.900.099.100,00	10.360.000,00	6.746.768.348,00	0,00	6.756.428.348,00	97,92	143.640.752,00

Halaman 1 dari 2





KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	
Melonguane, 31 Desember 2018 Kepala Dinas								
Dra. Jenny J. Pusungulaa, M.Si NIP. 196607231993032005								
Halaman 2 dari 2								

LAPORAN PENGAWASAN ANGGARAN DEKONTIF PERI KEGIATAN



Lampiran 13. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	829.632.925.008,00	0,00	798.195.873.433,00	798.195.873.433,00	(31.437.051.575,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	24.542.048.570,00	0,00	29.604.217.935,00	29.604.217.935,00	5.062.169.365,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.227.559.021,00	0,00	6.959.074.626,00	6.959.074.626,00	2.731.515.605,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.966.565.200,00	0,00	7.930.939.328,00	7.930.939.328,00	964.374.128,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disihkan	33.289.899,00	0,00	20.107.657,00	20.107.657,00	(13.182.242,00)
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.314.634.450,00	0,00	14.694.096.324,00	14.694.096.324,00	1.379.461.874,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	706.944.511.000,00	0,00	658.538.764.521,00	658.538.764.521,00	(48.405.746.479,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.257.106.000,00	0,00	15.678.364.716,00	15.678.364.716,00	(578.741.284,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	493.542.802.000,00	0,00	493.542.802.000,00	493.542.802.000,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	197.144.603.000,00	0,00	149.317.597.805,00	149.317.597.805,00	(47.827.005.195,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	98.146.365.438,00	0,00	110.052.890.977,00	110.052.890.977,00	11.906.525.539,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	12.539.014.438,00	0,00	12.445.539.977,00	12.445.539.977,00	(93.474.461,00)
4.3.6	Pendapatan Lainnya	85.607.351.000,00	0,00	97.607.351.000,00	97.607.351.000,00	12.000.000.000,00
5	BELANJA	890.415.341.478,00	0,00	834.602.779.563,00	834.602.779.563,00	(55.812.561.915,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	458.687.514.874,69	0,00	441.504.132.515,00	441.504.132.515,00	(17.183.382.359,69)
5.1.1	Belanja Pegawai	332.761.188.823,41	0,00	314.921.113.315,00	314.921.113.315,00	(17.840.075.508,41)
5.1.4	Belanja Hibah	5.354.600.000,00	0,00	7.487.349.400,00	7.487.349.400,00	2.132.749.400,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.456.000.000,00	0,00	2.220.500.000,00	2.220.500.000,00	(235.500.000,00)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.116.744.800,00	0,00	1.116.744.800,00	1.116.744.800,00	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	115.998.981.251,28	0,00	115.758.425.000,00	115.758.425.000,00	(240.556.251,28)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	431.727.826.603,31	0,00	393.098.647.048,00	393.098.647.048,00	(38.629.179.555,31)
5.2.1	Belanja Pegawai	28.596.379.619,00	0,00	26.305.059.801,00	26.305.059.801,00	(2.291.319.818,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	165.012.244.469,31	0,00	148.477.310.776,00	148.477.310.776,00	(16.534.933.693,31)
5.2.3	Belanja Modal	238.119.202.515,00	0,00	218.316.276.471,00	218.316.276.471,00	(19.802.926.044,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(60.782.416.470,00)	0,00	(36.406.906.130,00)	(36.406.906.130,00)	24.375.510.340,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	66.488.873.174,00	0,00	66.466.388.920,00	66.466.388.920,00	(22.484.254,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.488.873.174,00	0,00	66.466.388.920,00	66.466.388.920,00	(22.484.254,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.706.456.704,00	0,00	4.507.370.234,00	4.507.370.234,00	(1.199.086.470,00)
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	5.706.456.704,00	0,00	4.507.370.234,00	4.507.370.234,00	(1.199.086.470,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERORANGAN DAN BELANJA DAERAH



Lampiran 14. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD							
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH							
periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017							
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)	
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL		
4	PENDAPATAN	896.975.294.307,00	0,00	858.409.289.856,00	858.409.289.856,00	(38.565.994.451,00)	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.506.301.989,00	0,00	22.922.644.452,00	22.922.644.452,00	(28.583.657.537,00)	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.314.490.308,00	0,00	7.345.577.603,00	7.345.577.603,00	(8.968.912.705,00)	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.251.288.200,00	0,00	8.470.521.895,00	8.470.521.895,00	(8.780.766.305,00)	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	33.299.899,00	0,00	26.536.005,00	26.536.005,00	(6.763.894,00)	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	17.907.233.582,00	0,00	7.080.078.949,00	7.080.078.949,00	(10.827.154.633,00)	
4.2	DANA PERIMBANGAN	694.720.285.844,00	0,00	684.338.535.833,00	684.338.535.833,00	(10.381.750.011,00)	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.090.713.844,00	0,00	11.807.651.602,00	11.807.651.602,00	(4.283.062.242,00)	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	484.872.842.000,00	0,00	484.872.842.000,00	484.872.842.000,00	0,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	193.756.730.000,00	0,00	187.658.042.231,00	187.658.042.231,00	(6.098.687.769,00)	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.748.696.474,00	0,00	151.148.109.571,00	151.148.109.571,00	399.413.097,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	10.595.756.474,00	0,00	13.301.359.723,00	13.301.359.723,00	2.705.603.249,00	
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.900.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.900.000.000,00)	
4.3.6	Pendapatan Lainnya	138.252.940.000,00	0,00	137.846.749.848,00	137.846.749.848,00	(406.190.152,00)	
5	BELANJA	922.527.396.863,00	0,00	870.609.997.204,00	870.609.997.204,00	(51.917.399.659,00)	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	443.654.636.908,00	0,00	433.078.698.467,00	433.078.698.467,00	(10.575.938.441,00)	
5.1.1	Belanja Pegawai	279.548.567.056,72	0,00	277.924.622.017,00	277.924.622.017,00	(1.623.945.039,72)	
5.1.4	Belanja Hibah	10.478.800.000,00	0,00	10.314.000.000,00	10.314.000.000,00	(164.800.000,00)	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.067.000.000,00	0,00	9.452.000.000,00	9.452.000.000,00	(615.000.000,00)	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.116.744.800,00	0,00	853.287.400,00	853.287.400,00	(263.457.400,00)	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	142.343.525.051,28	0,00	134.534.789.050,00	134.534.789.050,00	(7.808.736.001,28)	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	
5.2	BELANJA LANGSUNG	478.872.759.955,00	0,00	437.531.298.737,00	437.531.298.737,00	(41.341.461.218,00)	
5.2.1	Belanja Pegawai	8.124.588.018,00	0,00	6.845.944.187,00	6.845.944.187,00	(1.278.643.831,00)	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	217.720.414.860,00	0,00	200.055.552.938,00	200.055.552.938,00	(17.664.861.922,00)	
5.2.3	Belanja Modal	253.027.757.077,00	0,00	230.629.801.612,00	230.629.801.612,00	(22.397.955.465,00)	
	SURPLUS / DEFISIT	(25.552.112.556,00)	0,00	(12.200.707.348,00)	(12.200.707.348,00)	13.351.405.208,00	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.552.112.556,00	0,00	25.552.112.556,00	25.552.112.556,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	25.552.112.556,00	0,00	25.552.112.556,00	25.552.112.556,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	25.552.112.556,00	0,00	25.552.112.556,00	25.552.112.556,00	0,00	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 2

Lampiran 15. Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018						
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	855.858.183.409,00	0,00	825.152.279.447,88	825.152.279.447,88	(30.705.903.961,12)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.686.917.622,00	0,00	23.866.653.507,88	23.866.653.507,88	(10.820.054.114,12)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10.420.480.300,00	0,00	6.077.297.858,00	6.077.297.858,00	(4.343.182.442,00)
4.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	12.947.322.900,00	0,00	9.593.338.070,00	9.593.338.070,00	(3.353.984.830,00)
4.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Diopsahkan	33.289.899,00	0,00	41.954.872,00	41.954.872,00	8.664.973,00
4.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.285.824.523,00	0,00	8.154.272.707,88	8.154.272.707,88	(3.131.551.815,12)
4.1.1.4						
4.2	DANA PERIMBANGAN	662.630.352.000,00	0,00	642.516.462.205,00	642.516.462.205,00	(20.113.889.795,00)
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.440.965.000,00	0,00	14.507.172.705,00	14.507.172.705,00	(933.792.295,00)
4.2.2	Dana Alokasi Umum	488.339.366.000,00	0,00	488.339.366.000,00	488.339.366.000,00	(15.321.000,00)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	158.834.700.000,00	0,00	139.669.523.500,00	139.669.523.500,00	(19.164.776.500,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.540.913.787,00	0,00	158.768.953.735,00	158.768.953.735,00	228.039.948,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	9.073.400.000,00	0,00	8.526.150.951,00	8.526.150.951,00	(547.249.049,00)
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.769.377.787,00	0,00	15.545.206.784,00	15.545.206.784,00	775.828.997,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dari Otonomi Khusus	35.250.000.000,00	0,00	35.250.000.000,00	35.250.000.000,00	0,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	0,00	999.460.000,00	999.460.000,00	(540.000,00)
4.3.6	Pendapatan Lainnya	98.448.136.000,00	0,00	98.448.136.000,00	98.448.136.000,00	0,00
5	BELANJA	868.209.586.617,00	0,00	812.451.453.376,00	812.451.453.376,00	(55.758.133.241,00)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	525.154.760.377,00	0,00	511.495.160.475,00	511.495.160.475,00	(13.659.599.902,00)
5.1.1	Belanja Pegawai	323.702.154.805,72	0,00	315.380.275.697,00	315.380.275.697,00	(8.321.879.108,72)
5.1.4	Belanja Hibah	42.054.200.000,00	0,00	41.981.478.658,00	41.981.478.658,00	(72.721.342,00)
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.840.900.000,00	0,00	2.123.100.000,00	2.123.100.000,00	(3.717.800.000,00)
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.336.780.320,00	0,00	2.336.780.320,00	2.336.780.320,00	0,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	150.220.725.251,28	0,00	149.673.525.800,00	149.673.525.800,00	(547.199.451,28)
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	343.054.826.240,00	0,00	300.956.292.901,00	300.956.292.901,00	(42.098.533.339,00)
5.2.1	Belanja Pegawai	5.825.082.646,00	0,00	4.827.897.763,00	4.827.897.763,00	(997.184.883,00)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	218.828.920.015,00	0,00	198.090.244.719,00	198.090.244.719,00	(20.738.675.296,00)
5.2.3	Belanja Modal	118.400.825.579,00	0,00	98.038.150.419,00	98.038.150.419,00	(20.362.675.160,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(12.351.405.208,00)	0,00	12.700.826.071,88	12.700.826.071,88	25.052.231.279,88
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.351.405.208,00	0,00	13.351.405.208,00	13.351.405.208,00	0,00

